



# Komoditas Keberlanjutan & Kolaborasi

Outlook Investasi Yurisdiksi  
Kabupaten Kubu Raya 2023

Januari 2023



### **Penafian**

Komoditas, Konservasi dan Kolaborasi: Outlook Investasi Yuridiksi Kabupaten Kubu Raya 2022 ini disusun berdasarkan observasi diskusi dan analisis bersama multi pemangku kepentingan terkait. Edisi pertama ini merupakan dokumen hidup sehingga mungkin akan ada penambahan konten pada edisi berikutnya



# DAFTAR ISI

3	<b>DAFTAR ISI</b>
4	<b>SAMBUTAN</b>
5	<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>
8	<b>PENDAHULUAN</b> Tujuan Outlook Investasi Bagaimana menggunakan Outlook Investasi? Investasi dalam pendekatan Yuridiksi
14	<b>KUBU RAYA SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS INVESTASI</b> Strategis secara Geografis Ekonomi terus bertumbuh Kesejahteraan dan Bonus Demografi Dukungan Infrastruktur Kubu Raya Kabupaten Pertumbuhan Hijau
19	<b>PEMBIAYAAN CAMPURAN UNTUK INVESTASI YURISDIKSI DI KUBU RAYA</b>
20	<b>PELUANG INVESTASI BERKELANJUTAN DI KUBU RAYA</b> Sawit Berkelanjutan Kelapa Dalam Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan: Ekowisata Jasa Lingkungan dari Hutan Desa Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Kopi Liberika Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Budidaya Paludikultur Restorasi Ekosistem dan Multiusaha Kehutanan Karet Berkelanjutan
38	<b>KONTRIBUSI PADA STRATEGIS PERCEPATAN PERTUMBUHAN HIJAU KUBU RAYA</b> Strategi Percepatan Pertumbuhan Hijau Kubu Raya Kontribusi pada Strategi Percepatan Pertumbuhan Hijau Kubu Raya
50	<b>KESIMPULAN</b>
51	<b>LAMPIRAN</b> Matriks Komoditas Unggulan di Kabupaten Kubu Raya Matriks indikator dampak investasi terhadap aspek sosial dan lingkungan Matriks peta stakeholder investasi berkelanjutan di Kubu Raya

# SAMBUTAN

## Muda Mahendrawan

Bupati Kubu Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, dapat kami hadirkan dokumen Outlook Investasi Yurisdiksi Kubu Raya 2023 ke hadapan pembaca semua.

Tujuan penyusunan dokumen Outlook Investasi Yurisdiksi ini adalah untuk mendukung Kabupaten Kubu Raya dalam mencapai target pertumbuhan hijau sehingga terwujud keseimbangan antara peningkatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan gambut dan mangrove, dan peningkatan pendapatan masyarakat, melalui skema investasi berkelanjutan yang mendukung kemajuan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang terus memperkuat pemulihan ekonomi setelah pandemi covid-19. Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah untuk pengembangan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Kabupaten ini juga mempunyai hutan mangrove terluas di Kalimantan Barat, yakni 132.887,81 hektar atau 75,84% dari total luas mangrove di Kalimantan Barat. Selain itu, lebih dari 60% lahan di Kubu Raya merupakan kawasan gambut. Karena itu, sumber daya alam Kubu Raya harus dikelola secara berkelanjutan untuk kemakmuran ekonomi dan daya tahan lingkungan.

Untuk mendukung percepatan pertumbuhan hijau di Kabupaten Kubu Raya, diperlukan adanya dokumen arah kebijakan terhadap pengembangan investasi berkelanjutan. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pencapaian target pertumbuhan hijau di Kabupaten Kubu Raya. Outlook ini memberikan informasi yang akurat tentang potensi investasi yurisdiksi berbasis komoditas unggulan di Kubu Raya. Outlook ini adalah living document yang akan terus dikembangkan dan diperbaharui informasi potensi investasi hijau di Kubu Raya.

Akhirnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam pengembangan Outlook Investasi Yurisdiksi Kubu Raya 2023 ini. Kami juga berterima kasih kepada banyak pihak yang telah mendukung perumusan dan penyusunan Outlook ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



# UCAPAN TERIMA KASIH



Pemerintah  
Kabupaten Kubu Raya



yayasan inisiatif  
dagang hijau



TROPICAL FOREST ALLIANCE

Hutan Mangrove Kubu Raya



## KEUNGGULAN BERINVESTASI DI KUBU RAYA:



Kabupaten Kubu Raya memiliki posisi yang sangat strategis yaitu sebagai Hinterland Kota Pontianak sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Kubu Raya merupakan bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Pontianak Metropolitan Area (PMA) dalam RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) Tahun 2008-2028.



Kubu Raya adalah pintu gerbang Provinsi Kalimantan Barat karena terdapat Bandara Internasional Supadio yang bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam dari Jakarta. Selain itu, Kubu Raya memiliki fasilitas Terminal Antar Lintas Batas Negara (Terminal ALBN) Ambawang dan Pelabuhan KTM Rasau Jaya. Fasilitas-fasilitas penting ini membuat Kabupaten Kubu Raya mudah diakses dari berbagai wilayah Indonesia dan manca negara.



Stabilitas keamanan investasi terjamin. Kondisi ini didukung oleh keberadaan fasilitas strategis nasional seperti pangkalan TNI-AU dan Markas KODAM Tanjungpura XII yang menunjang stabilitas keamanan investasi di Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat.



PDRB Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 mencapai 31,23 triliun rupiah. PDRB Kubu Raya tumbuh sebesar 5,18% per tahun pada tahun 2021, dan ditopang oleh sektor industri pengolahan berbasis industri sawit sebesar 35,30%, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,15%.



Kesiapan investasi berkelanjutan dan pertumbuhan hijau. Kubu Raya mempunyai landasan legal Perda No. 6/2013 tentang Penanaman Modal dan RPJMD Kubu Raya 2019-2024 yang ramah investasi hijau. Kabupaten Kubu Raya juga mempunyai SRAK-PPH (Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Pertumbuhan Hijau). SRAK-PPH merupakan rencana operasional pemangku kepentingan di level yurisdiksi Kabupaten Kubu Raya dalam mendorong investasi berkelanjutan di wilayah ini.



Insentif fiskal untuk investasi hijau. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah menerapkan transfer fiskal berbasis ekologi (TAKE) untuk desa-desa hijau sejak tahun 2019. Sampai saat ini sudah ada 31 desa yang mempunyai izin Perhutanan Sosial dan menerapkan perlindungan lingkungan dan sosial berbasis ekologi.



Kolaborasi untuk memperkuat pertumbuhan hijau. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pertumbuhan hijau dan investasi berkelanjutan, melibatkan sektor swasta, lembaga donor, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan sebagainya.



Geoportal Kubu Raya sebagai katalog data dan informasi geospasial yang memudahkan para pihak mendapatkan informasi tentang potensi investasi berkelanjutan dan berbagai informasi lainnya tentang Kubu Raya. Geoportal ini mendapat penghargaan nasional dari Badan Informasi Geospasial (BIG), dan penghargaan lainnya.



Kebijakan di sektor Pendidikan melalui Pengadaan Kurikulum Mulok Mangrove dan Gambut dalam rangka mengedukasi dan menciptakan SDM unggul yang berwawasan lingkungan di masa mendatang.





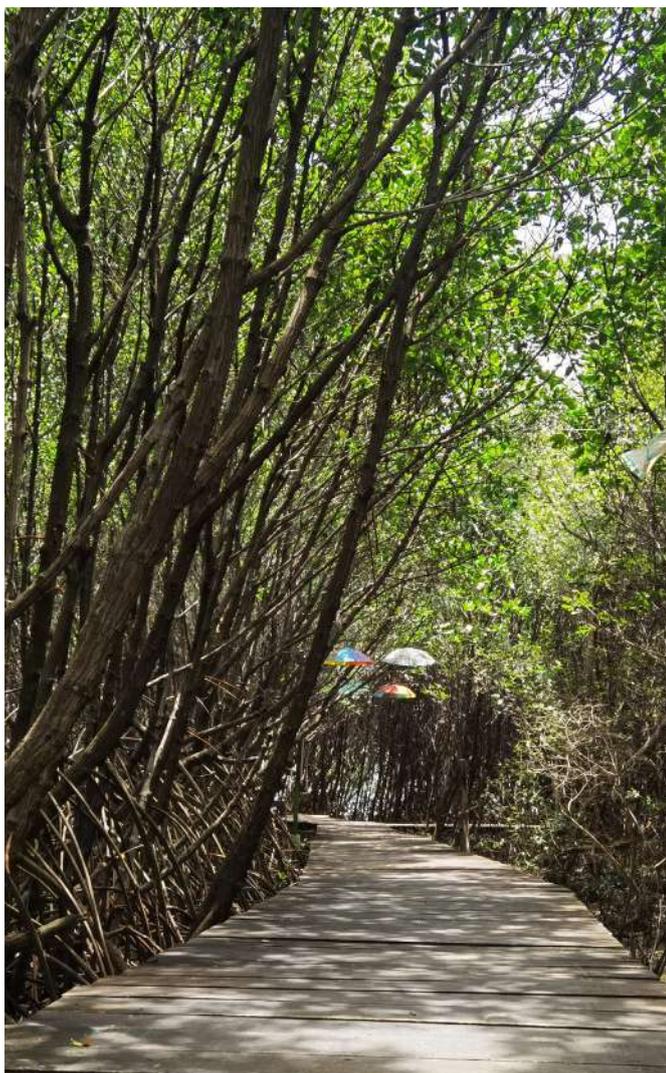
# PENDAHULUAN



*Kantor Bupati Kubu Raya, Photo oleh BKDSM Kubu Raya*



Hutan Mangrove Kubu Raya, photo oleh Bappeda



Wisata Hutan Mangrove Beteng Batang Dabong, photo oleh Bappeda

## TUJUAN OUTLOOK INVESTASI

Investment Outlook Kabupaten Kubu Raya merupakan sebuah sarana untuk mempromosikan, menginformasikan, dan menarik investor dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka mendukung pertumbuhan hijau, memperkuat pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam wilayah yurisdiksi Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

## BAGAIMANA MENGGUNAKAN OUTLOOK INVESTASI?

Investment Outlook ini merupakan dokumen publik yang bisa diakses oleh semua pihak, khususnya investor yang berminat untuk mengembangkan investasi berkelanjutan di wilayah yurisdiksi Kabupaten Kubu Raya. Dokumen ini memuat informasi kondisi geografis, demografis, sosial ekonomi, dukungan infrastruktur, serta kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mendukung investasi berkelanjutan dengan pendekatan yurisdiksi. Dokumen ini juga memuat peluang investasi untuk berbagai komoditas unggulan.

Outlook ini merupakan dokumen yang hidup (living document) dan berkembang dinamis, dimana secara berkala, pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan melakukan pembaharuan dan pemutakhiran data dan informasi dalam Outlook ini tentang potensi investasi komoditas unggulan di wilayah ini.

Dokumen ini juga sebagai panduan untuk investor dan parapihak yang berminat dalam pengembangan investasi berkelanjutan dengan pendekatan yurisdiksi. Investor dan para pihak perlu membaca dan mempelajari dokumen ini secara utuh untuk memahami semua kondisi pendukung (enabling conditions) dan potensi komoditas unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan.



Kawasan Pertanian Padi, photo oleh Bappeda

## INVESTASI DALAM PENDEKATAN YURISDIKSI

### Pendekatan Yurisdiksi

Pendekatan yurisdiksi merupakan sebuah pendekatan yang menempatkan pemerintah sub-nasional (provinsi atau kabupaten) sebagai aktor utama dalam pengelolaan lanskap secara kolaboratif dan berkelanjutan. The Little Sustainable Landscapes Book menjelaskan bahwa pendekatan yurisdiksi sebagai: *“a type of landscape approach that uses government administrative boundaries, primarily subnational, to define the scope of action and involvement of stakeholders”*.<sup>1</sup>

Sementara Essen dan Lambin (2021)<sup>2</sup>, menjelaskan tipologi pendekatan yurisdiksi, dimana kriteria untuk membangun pendekatan yurisdiksi ditentukan oleh dua aspek, yakni (1) tingkat keterlibatan pemerintah, dan (2) fokus intervensi. Menurut Essen dan Lambin, pemerintah lokal menjadi aktor kunci dalam pendekatan yurisdiksi. Karena itu, dukungan kebijakan pemerintah (government policies) menjadi aspek penting untuk mendukung pendekatan yurisdiksi dalam wilayah provinsi atau kabupaten.

<sup>1</sup> The Little Sustainable Landscape Book: Achieving Sustainable Development through Integrated Landscape Management (tidak ada tahun), diterbitkan oleh CCP, IDH, TNC dan WWF.

<sup>2</sup> Marius von Essen and Eric F. Lambin, 2021, Jurisdictional Approach to Sustainable Resource Use, *Frontiers in Ecology and the Environment*, Vol. 9, Issue 3: 159-167.

Tingkat keterlibatan pemerintah provinsi atau kabupaten (tinggi, rendah atau sedang) memperlihatkan komitmen engagement dalam pendekatan yurisdiksi. Sementara fokus intervensi dalam pendekatan yurisdiksi dibagi menjadi tiga fokus: (1) Intervensi fokus pada komoditas; (2) Intervensi fokus pada banyak sektor (multiple sectors); dan (3) Intervensi fokus pada stok karbon (konservasi).

Private sektor dan masyarakat sipil berada dalam posisi di luar yurisdiksi. Namun demikian, kedua aktor ini mempunyai peran berbeda dalam memperkuat pendekatan yurisdiksi oleh pemerintah provinsi atau kabupaten. Private sektor berperan dalam memobilisasi sumberdaya untuk memperkuat investasi di berbagai sektor dan komoditas, serta memastikan terjaganya stok karbon dan konservasi keanekaragaman hayati.

Sementara peran masyarakat sipil dalam pendekatan yurisdiksi adalah sebagai katalisator dan dinamisator untuk memastikan lahirnya kebijakan pemerintah, peningkatan kapasitas institusional, memperkuat pola relasional antar aktor, serta memastikan berjalannya prinsip-prinsip inklusif, akuntabel, transparansi dan partisipasi dalam wilayah yurisdiksi. Aspek tatakelola juga menjadi bagian penting yang diperkuat oleh masyarakat sipil, termasuk tatakelola pemerintah, tatakelola bisnis, dan tatakelola lingkungan.

## Prinsip Pendekatan Yurisdiksi untuk Investasi Berkelanjutan

Pendekatan yurisdiksi merupakan sebuah pendekatan dalam memperkuat keberlanjutan pembangunan melalui keseimbangan ekologis berbasis wilayah administratif pemerintahan. Keseimbangan ekologis dicapai melalui keseimbangan antara produksi (hulu, industri, infrastruktur) dan proteksi (konservasi, restorasi). Dalam pendekatan yurisdiksi, pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam memberi dukungan kebijakan dan fiskal. Sementara proses perencanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara inklusif, partisipatif, konsultatif, dan multistakeholder yang dipimpin oleh Kepala Daerah.

Keberlanjutan berbasis komoditas, multisektor dan mempertahankan stok karbon. Keberlanjutan dalam pendekatan yurisdiksi dilakukan melalui pengelolaan komoditas unggulan di berbagai sektor yang terdapat dalam wilayah yurisdiksi. Dalam proses produksi komoditas unggulan tersebut, upaya untuk menjaga keberadaan stok karbon menjadi salah satu hal penting dalam pendekatan yurisdiksi. Stok karbon dipertahankan bukan hanya dalam proses produksi, namun juga dalam semua rantai pasok komoditas-komoditas tersebut.

Komitmen sektor swasta untuk keberlanjutan. Pendekatan yurisdiksi membutuhkan komitmen sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan dalam proses produksi komoditas dan rantai pasok. Karena itu, aspek verifikasi dan keterlacakan dalam proses produksi dan rantai pasok menjadi satu hal penting untuk memastikan bahwa komoditas tersebut bebas deforestasi.

Inisiatif masyarakat sipil untuk memastikan berjalannya pendekatan yurisdiksi secara inklusif, akuntable, transparan dan partisipatif. Partisipasi masyarakat sipil menjadi penting dalam memperkuat investasi berkelanjutan dalam wilayah yurisdiksi supaya bisa berjalan secara inklusif, akuntable, transparan dan partisipatif. Inisiatif-inisiatif masyarakat sipil dan kolaborasi bersama dengan sektor swasta dalam mendorong investasi berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam pendekatan yurisdiksi.



## Komitmen Pemerintah untuk Investasi Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk mendorong investasi berkelanjutan dan *green economy* dalam RPJMN 2020-2024 (khususnya tujuan 4, 6 dan 7). Kondisi ini terlihat dalam tujuan 4 yakni mendorong pemulihan dunia usaha, tujuan 6 yaitu pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim, serta tujuan 7 yakni percepatan pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk memperkuat sektor swasta dalam investasi berkelanjutan melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. OJK mengeluarkan beberapa panduan investasi berkelanjutan, termasuk Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), dan Taksonomi Hijau Indonesia. Taksonomi Hijau bisa menjadi pedoman bagi investor, perbankan, pemerintah, atau lembaga internasional dalam menilai sejauh mana sebuah bisnis menjalankan prinsip ramah lingkungan.

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk mengurangi deforestasi dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim melalui target NDC, FOLU Net Sink, dan Net Zero Emission. Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 16/2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris dibawah UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*). Sebagai konsekuensinya, Indonesia membuat target penurunan emisi melalui NDC (*Nationally Determined Contributions*), dimana dalam enhanced NDC, Indonesia meningkatkan komitmen penurunan emisi dengan kemampuan sendiri dari 29% menjadi 31,89%, dan dengan dukungan internasional dari 41% menjadi 43,20%. Selain itu, Indonesia juga mempunyai target FOLU Net Sink tahun 2030 dan Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya dalam mempercepat pertumbuhan hijau. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan dokumen Rencana Pertumbuhan Hijau Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 yang menjadi dasar kebijakan investasi hijau dan berkelanjutan di provinsi ini. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga mengeluarkan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Pertumbuhan Hijau (SRAK-PPH) Kubu Raya tahun 2020. Dokumen SRAK-PPH merupakan rencana operasional pemerintah Kubu Raya dan parapihak untuk mempercepat pertumbuhan hijau di kabupaten ini.



Kawasan Pertenakan Ayam, photo oleh Bappeda



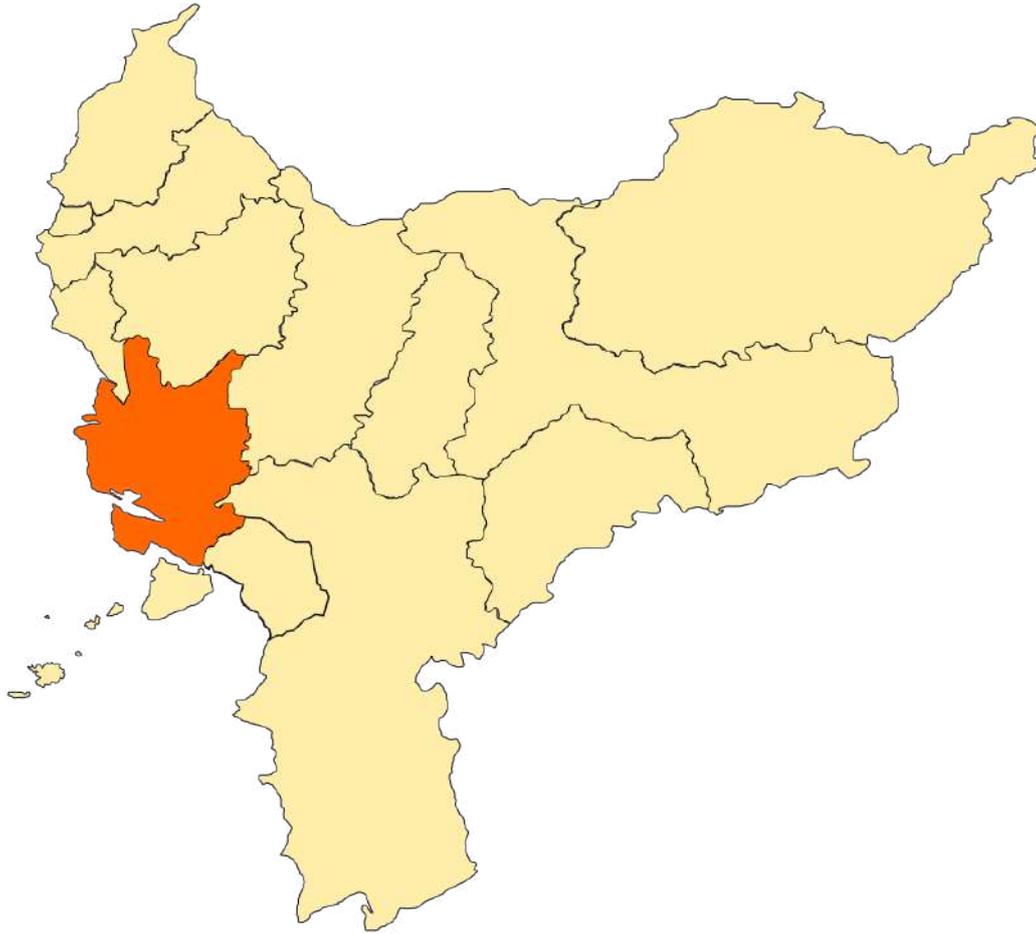
Kawasan Pertanian Jengkol, photo oleh Bappeda

## Berinvestasi dalam Pendekatan Yurisdiksi

Pendekatan yurisdiksi memberi ruang bagi berkembangnya investasi berkelanjutan yang berkontribusi pada *green economy* dan *green growth*. Investasi berkelanjutan dalam pendekatan yurisdiksi berjalan dengan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah kabupaten, pembangunan infrastruktur, pengembangan komoditas dan konservasi/keberlanjutan ekosistem. Pendekatan yurisdiksi tidak menegasikan tujuan investasi untuk mengejar keuntungan, namun bagaimana mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga tujuan akumulasi kapital tetap berada dalam kerangka keberlanjutan sumberdaya, proteksi ekologi, serta proses yang inklusif bersama para pihak.

Investor akan mendapatkan kepastian usaha yang lebih kuat dengan pendekatan yurisdiksi karena dukungan pemerintah kabupaten sebagai penanggung jawab utama dalam wilayah yurisdiksi, serta dukungan stakeholder lainnya. Peran pemerintah daerah yang sentral dalam pendekatan yurisdiksi memberikan kepastian usaha kepada investor. Di sisi lain, investor juga bisa membangun kolaborasi dengan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai lembaga internasional untuk memperkuat inisiatif keberlanjutan dalam investasi yang dijalankan.

Pendanaan untuk investasi berkelanjutan di wilayah yurisdiksi bisa dikonsolidasikan dari berbagai sumber pembiayaan campuran (*blended finance*). Sumber pembiayaan campuran ini dapat berasal dari pendanaan publik (APBN, APBD), hibah (dalam dan luar negeri), dan dana filantropi, yang bisa digunakan untuk memperkuat inisiatif investasi berkelanjutan dalam wilayah yurisdiksi. Pembiayaan campuran ini dapat mengurangi resiko investasi di satu sisi, dan meningkatkan dukungan parapihak dalam mendorong keberlanjutan di sisi lain.



Lokasi Kabupaten Kubu Raya pada Provinsi Kalimantan Barat, Sumber: Wikipedia

## KUBU RAYA SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS INVESTASI

### Strategi secara Geografis

Kabupaten Kubu Raya merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yang bisa diakses hanya dengan 1,5 jam penerbangan dari ibukota Jakarta. Ibukota Kabupaten Kubu Raya juga berbatasan langsung dengan Kota Pontianak. Secara geografis, Kabupaten Kubu Raya terletak pada posisi 0°13'40,83" sampai 1°00'53,09" Lintang Selatan dan 109°02'19,32" sampai 109°58'32,16" Bujur Timur. Kabupaten ini mempunyai luas 8.550,35 km<sup>2</sup>, dan terdiri dari 123 desa yang tersebar di 9 Kecamatan.<sup>3</sup>

Secara geografis, Kabupaten Kubu Raya memiliki posisi sangat strategis sebagai *Hinterland* Kota Pontianak, yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini, Kubu Raya ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Pontianak Metropolitan Area (PMA)<sup>4</sup> dalam RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) Tahun 2008-2028. Posisi ini menempatkan Kubu Raya sebagai wilayah penting untuk pertumbuhan ekonomi dalam Kawasan Pontianak Metropolitan Area.

<sup>3</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021.

<sup>4</sup> Dalam draft Peraturan Daerah Kalimantan Barat tentang RTRW Kalimantan Barat 2023-2043 yang sedang disusun oleh Pemerintah Kalbar, istilah Kawasan Pontianak Metropolitan Area (PMA) diganti menjadi Kawasan Metropolitan Pontianak Raya (KAMPORA).

## Ekonomi Terus Bertumbuh

Meskipun dihantam bencana covid-19, ekonomi Kubu Raya terus bertumbuh hingga 5,18% di tengah proses recovery yang dilakukan Pemerintah Kubu Raya saat ini. Pada tahun 2021, ekonomi Kubu Raya tumbuh sebesar 5,18%. Agregat ekonomi Kubu Raya (PDRB) tahun 2021 mencapai 31,23 triliun rupiah (\$ 2.08 miliar). Karena lebih dari 60% wilayahnya merupakan lahan gambut, maka pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan menjadi pendekatan penting ke depan di kabupaten ini.

Ekonomi Kubu Raya mayoritas ditopang oleh kontribusi sektor industri pengolahan berbasis sawit dan produksi CPO (*Crude Palm Oil*). Sektor industri pengolahan menyumbang 35,30% PDRB Kubu Raya, diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,15%, dan sektor konstruksi sebesar 12,10%. Karena ketergantungan pada komoditas sawit dan produk turunannya, yakni CPO, maka upaya pengelolaan sawit berkelanjutan menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan di kabupaten ini.

Sebagai daerah strategis dan cepat tumbuh dan didukung dengan iklim investasi yang kondusif, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kubu Raya setiap tahun menunjukkan pertumbuhan yang cukup meningkat secara signifikan. PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan daerah agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Realisasi PAD Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 mencapai 160,85 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 151,02 miliar rupiah.

<sup>5</sup> Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif (15-64 tahun) jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.

## Kesejahteraan dan Bonus Demografi

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita masih dibawah rata-rata nasional, yakni 51,2 juta rupiah (\$ 3.400) per orang per tahun. Melalui strategi pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan, PDRB per kapita diharapkan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang, dan diproyeksi berada di atas \$ 6.000 per orang per tahun pada 2030. Investasi berkelanjutan didorong untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kubu Raya.

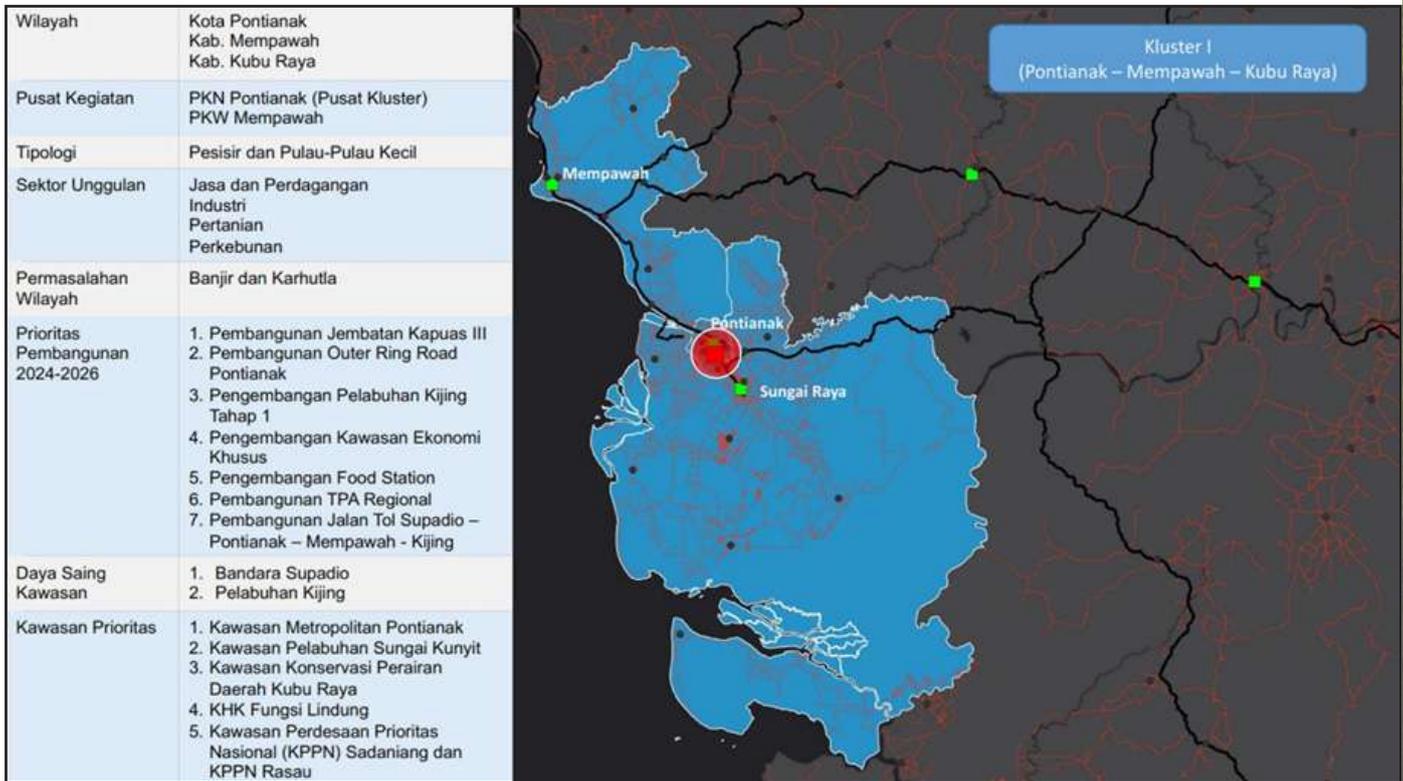
Penduduk Kabupaten Kubu Raya selama satu dekade terakhir terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kubu Raya pada tahun 2021 adalah 615.125 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 314.298 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 300.827.

Kabupaten Kubu Raya sedang berada dalam fase Bonus Demografi.<sup>5</sup> Pada tahun 2021, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Kubu Raya (usia 15 - 64 tahun) sebanyak 444.347 atau sekitar 72,21% dari total seluruh penduduk. Hal ini menjadi peluang bagi Kabupaten Kubu Raya untuk terus meningkatkan kualitas SDM agar penyerapan tenaga kerja untuk pasar tersedia serta menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja tersebut.

Jumlah penduduk miskin di Kubu Raya terus menurun dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 25.470 jiwa (4,34%), menurun 0,03 point dibandingkan tahun 2020. Angka kemiskinan ini jauh menurun dibandingkan kemiskinan tahun 2017 sebesar 5,26%. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kubu Raya tahun 2021 mencapai 68,16, berada di atas rata-rata IPM Kalimantan Barat sebesar 67,9. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan manusia di kabupaten ini terus meningkat.



Sumber Daya Alam Horti Rasau, photo oleh Bappeda



Peta Pengembangan Wilayah

## Dukungan Infrastruktur

Kabupaten Kubu Raya ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Kawasan Pontianak Metropolitan Area (PMA)<sup>6</sup> dalam RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) Tahun 2008-2028. Dengan demikian, Kubu Raya menjadi penyangga dan bagian penting dari percepatan pembangunan PMA, dan sebagai wilayah utama untuk pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.<sup>7</sup>

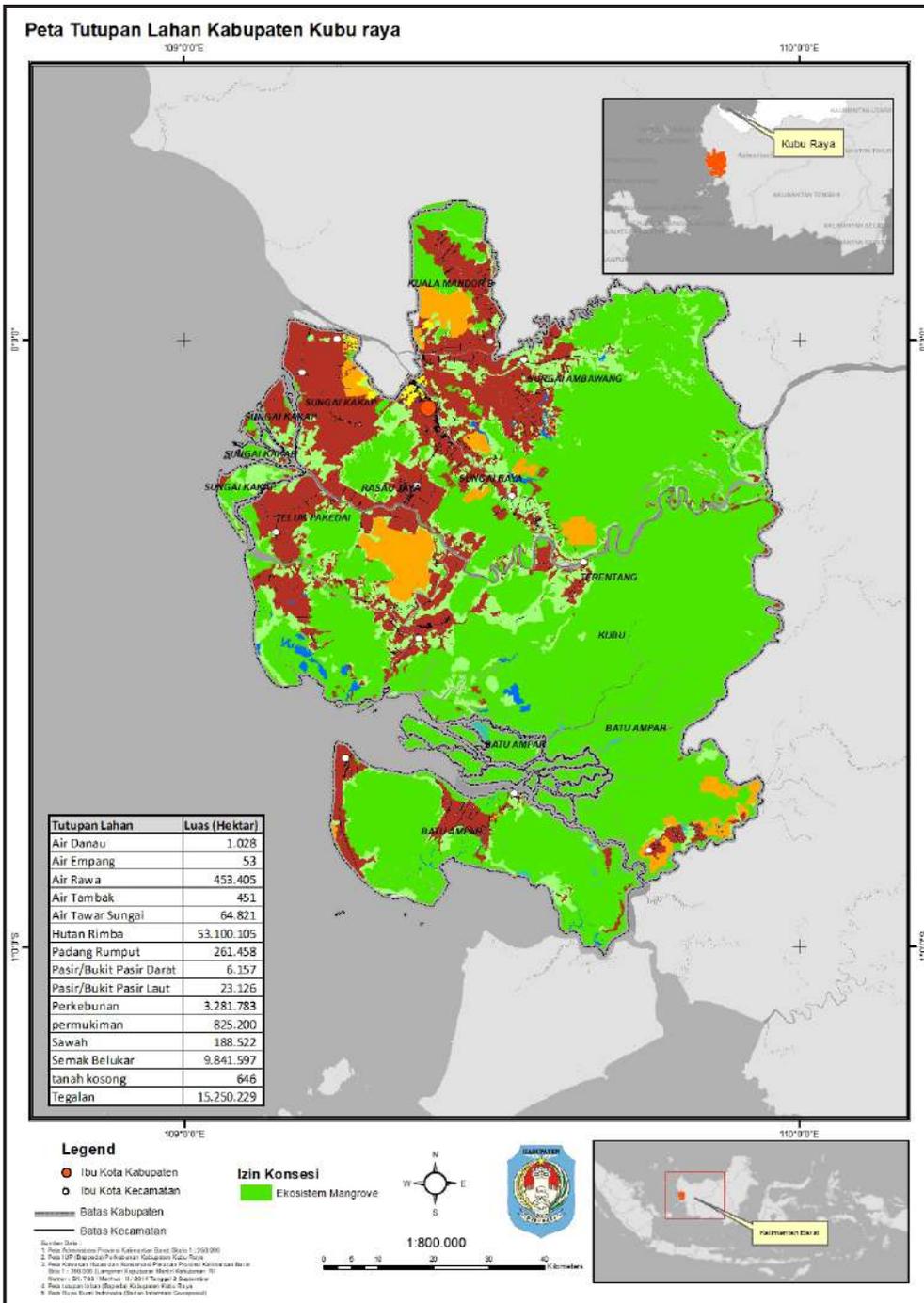
Kondisi ini didukung oleh posisi Kubu Raya sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Barat karena terdapat Bandara Internasional Supadio, Terminal Antar Lintas Batas Negara (Terminal ALBN) Ambawang dan Pelabuhan KTM (Kota Terpadu Mandiri) Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya. Selain itu terdapat pula fasilitas strategis nasional seperti pangkalan TNI-AU dan Markas KODAM Tanjungpura XII yang menunjang stabilitas keamanan investasi di Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat.

Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Internasional Kijing baru saja selesai dibangun di Kabupaten Mempawah, dengan jarak sekitar 140 km dari Ibukota Kubu Raya. Pelabuhan ini akan meningkatkan konektivitas dan daya saing komoditas unggulan Kubu Raya, yakni CPO, dan komoditas lainnya. Bagi investor, kehadiran Pelabuhan Kijing akan memudahkan ekspor komoditas dan produk unggulan dari Kubu Raya dan Kalimantan Barat.

Ketersediaan listrik dan air bersih dijamin oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk mendukung investasi berkelanjutan. PLN menjamin ketersediaan listrik untuk pengembangan investasi baru di Kabupaten Kubu Raya. Secara umum, rasio elektrifikasi Kabupaten Kubu Raya mencapai 98,66%, terdiri dari 93,77% listrik dari PLN dan 3,72% listrik dari non PLN. Selain itu, PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya juga terus meningkatkan layanan air bersih untuk masyarakat dan industri.

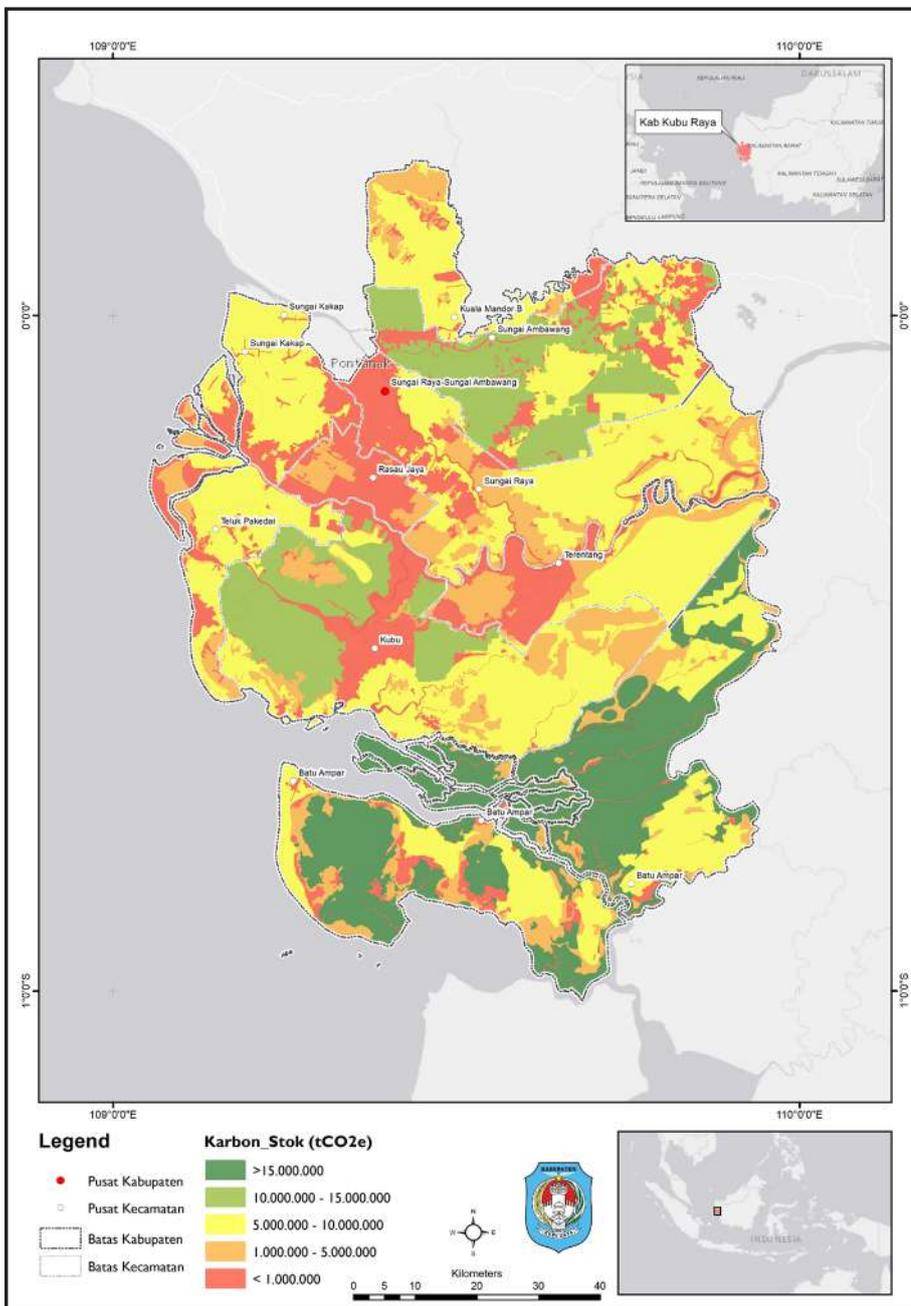
<sup>6</sup> Dalam draft Perda Kalimantan Barat tentang RTRW Kalimantan Barat 2023-2043, istilah ini berubah menjadi Kawasan Metropolitan Pontianak Raya (KAMPORA).

<sup>7</sup> Dokumen Bappedalitbang Kubu Raya, 2022 (tidak dipublikasikan).



## Kubu Raya Kabupaten Pertumbuhan Hijau

Kebijakan pertumbuhan hijau Provinsi Kalimantan Barat 2018 menjadi pemicu bagi Kabupaten Kubu Raya dalam mendorong pertumbuhan hijau di wilayah ini. Pertumbuhan hijau Provinsi Kalimantan Barat fokus pada tiga pilar. *Pertama*, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), penertiban pemanfaatan lahan, dan tata kelola perizinan; *kedua*, membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk memastikan rantai pasok komoditas diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan *ketiga*, pembangunan rendah emisi yang inklusif dengan partisipasi aktif masyarakat adat dan petani kecil.



Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai komitmen pada pertumbuhan hijau dan investasi hijau, setelah dikeluarkannya dokumen Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Pertumbuhan Hijau (SRAK-PPH) Kabupaten Kubu Raya tahun 2020. SRAK PPH Kabupaten Kubu Raya fokus pada 7 strategi pertumbuhan hijau. Salah satu yang relevan dengan pengembangan investasi berbasis yurisdiksi adalah strategi ke 4, yakni meningkatkan produktivitas komoditas kunci di Kabupaten Kubu Raya sehingga berkontribusi pada PDRB, dan strategi ke 4, yaitu menciptakan insentif dan nilai tambah dalam rantai pasok komoditas.<sup>8</sup> Kabupaten Kubu Raya juga mempunyai Peraturan Bupati No. 54/2021 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kubu Raya 2021-2025. Perbub ini menegaskan salah satu arah kebijakan Kubu Raya untuk mengembangkan investasi hijau.

<sup>8</sup> Lihat dokumen Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Pertumbuhan Hijau (SRAK PPH) Kabupaten Kubu Raya, 2020, hal. 98-99.

<sup>9</sup> Buka <https://kuburayakab.go.id/seputar-kuburaya/berita/kelola-pelestarian-gambut/>, diunduh tanggal 3 Desember 2022.

<sup>10</sup> Hasil perhitungan tim penyusun Outlook Investasi Kubu Raya 2023.

Sebagai kabupaten dengan 60% wilayah gambut<sup>9</sup> dengan potensi stok karbon mencapai 188.344.330 tCO<sub>2</sub>e<sup>10</sup>, maka pertumbuhan hijau menjadi pilihan utama strategi pembangunan dan investasi untuk keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan ekologi. Kabupaten Kubu Raya saat ini sedang menyusun RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) untuk memperkuat pengelolaan dan perlindungan gambut secara berkelanjutan di wilayah ini. RPPEG ini juga sejalan dengan Strategi dan Rencana Aksi Pertumbuhan Hijau (SRAK PPH) Kubu Raya.



Mangrove di Sui Jenu, Batu Ampar, photo oleh WWF Indonesia - Udiyansyah

## PEMBIAYAAN CAMPURAN UNTUK INVESTASI YURISDIKSI DI KUBU RAYA

Sejumlah studi<sup>11</sup> memperlihatkan bahwa pembiayaan campuran (blended finance) merupakan pilihan pembiayaan yang paling tepat untuk investasi berkelanjutan dengan pendekatan yurisdiksi. *Blended finance is the use of catalytic capital from public or philanthropic sources to increase private sector investment in sustainable development.*<sup>12</sup> Pembiayaan campuran mencoba menggunakan dana publik dan filantropi untuk meningkatkan dan memobilisasi tambahan pembiayaan kepada investasi swasta dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Sumber keuangan publik termasuk pembiayaan oleh pemerintah, bantuan keuangan bilateral dan multilateral, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU). Sementara penggunaan dana filantropi bisa dilakukan untuk mendukung misi keberlanjutan yang dijalankan oleh sektor swasta. Filantropi yang digunakan bisa berbentuk hibah, pinjaman dengan subsidi besar, dan skema lainnya.

Pembiayaan campuran bagus digunakan untuk mempersiapkan kondisi pendukung (enabling condition) investasi berkelanjutan dengan pendekatan yurisdiksi. Kondisi prasyarat untuk investasi berkelanjutan dengan pendekatan yurisdiksi perlu disiapkan dengan baik, termasuk dukungan kebijakan pemerintah kabupaten terhadap pendekatan yurisdiksi, komitmen pemerintah kabupaten dan parapihak, peningkatan kapasitas pemerintah dan parapihak, serta membangun komitmen bersama pemerintah, sektor swasta dan para pihak lainnya tentang pentingnya pendekatan yurisdiksi dalam mendukung investasi berkelanjutan. Biasanya, dana filantropi dalam bentuk hibah cenderung lebih mudah digunakan untuk mempersiapkan kondisi prasyarat menuju penerapan pendekatan yurisdiksi.

Pemerintah Kubu Raya sudah mempersiapkan skema investasi berkelanjutan berbasis yurisdiksi. Skema investasi berkelanjutan dengan pendekatan yurisdiksi sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang saat ini diperkuat dengan adanya Mall Pelayanan Publik, yang membuat proses dan prosedur investasi menjadi lebih mudah, ringkas dan efisien.

<sup>11</sup> Lihat sejumlah studi, seperti (1) Credit Suisse, WWF, and McKinsey and Company, 2014. *Conservation Finance: Moving beyond donor funding toward an investor-driven approach*. Credit Suisse, World Wide Fund for Nature International, and McKinsey and Company; (2) Blended Finance Taskforce, 2018. *Better Finance Better World: Consultation Paper of the Blended Finance Taskforce*. Business and Sustainable Development Commission and SystemIQ, London; (3) Shames, Clarvis, and Kissinger, 2014. *Financing Strategies for Integrated Landscape Investments: Synthesis Report*. EcoAgriculture Partners on behalf of the Landscapes for People, Food and Nature Initiative, Washington, DC.

<sup>12</sup> <https://www.convergence.finance/blended-finance>, diunduh tanggal 16 Desember 2022.

# PELUANG INVESTASI BERKELANJUTAN DI KUBU RAYA



Kabupaten Kubu Raya mempunyai sejumlah peluang investasi berkelanjutan berbasis komoditas yang bisa dikembangkan secara kolaboratif dengan pendekatan yurisdiksi. Sebanyak delapan komoditas unggulan membuka peluang investasi di kabupaten ini, baik di sektor pertanian/perkebunan, kehutanan, serta pengelolaan gambut dan mangrove secara berkelanjutan.

Kelapasawit merupakan komoditas penting yang menyumbang pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kubu Raya. Karena itu, upaya untuk memastikan berjalannya investasi sawit berkelanjutan menjadi penting dalam pendekatan yurisdiksi, untuk menyeimbangkan antara produksi dan proteksi/konservasi. Di sisi lain, peningkatan partisipasi petani sawit mandiri untuk terlibat dalam pengelolaan sawit berkelanjutan perlu terus diperkuat melalui sertifikasi dan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Karena sebagian besar wilayah Kubu Raya merupakan lahan gambut dan mangrove, pengelolaan gambut dan mangrove secara berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi perlu dilakukan. Kondisi ini sekaligus ditujukan untuk mendorong investasi hijau di kawasan gambut dan mangrove, serta memastikan aspek perlindungan dan keberlanjutan.

Informasi tentang peluang investasi berkelanjutan berbasis yurisdiksi untuk berbagai komoditas unggulan di Kabupaten Kubu Raya dapat diperoleh melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) atau melalui Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kubu Raya.

**Narahubung:**

**Maria Agustina, SE., M.Si.**

Kepala Dinas PMPTSP  
Kabupaten Kubu Raya  
Email: ayongptk@gmail.com  
Telepon: +62821 5386 6455

**Herbimo Utoyo, S.Hut.**

Ketua Sekretariat Pokja Percepatan  
Pertumbuhan Hijau Kabupaten Kubu  
Raya  
Email: aryosena@gmail.com  
Telepon: +62811 570 3335



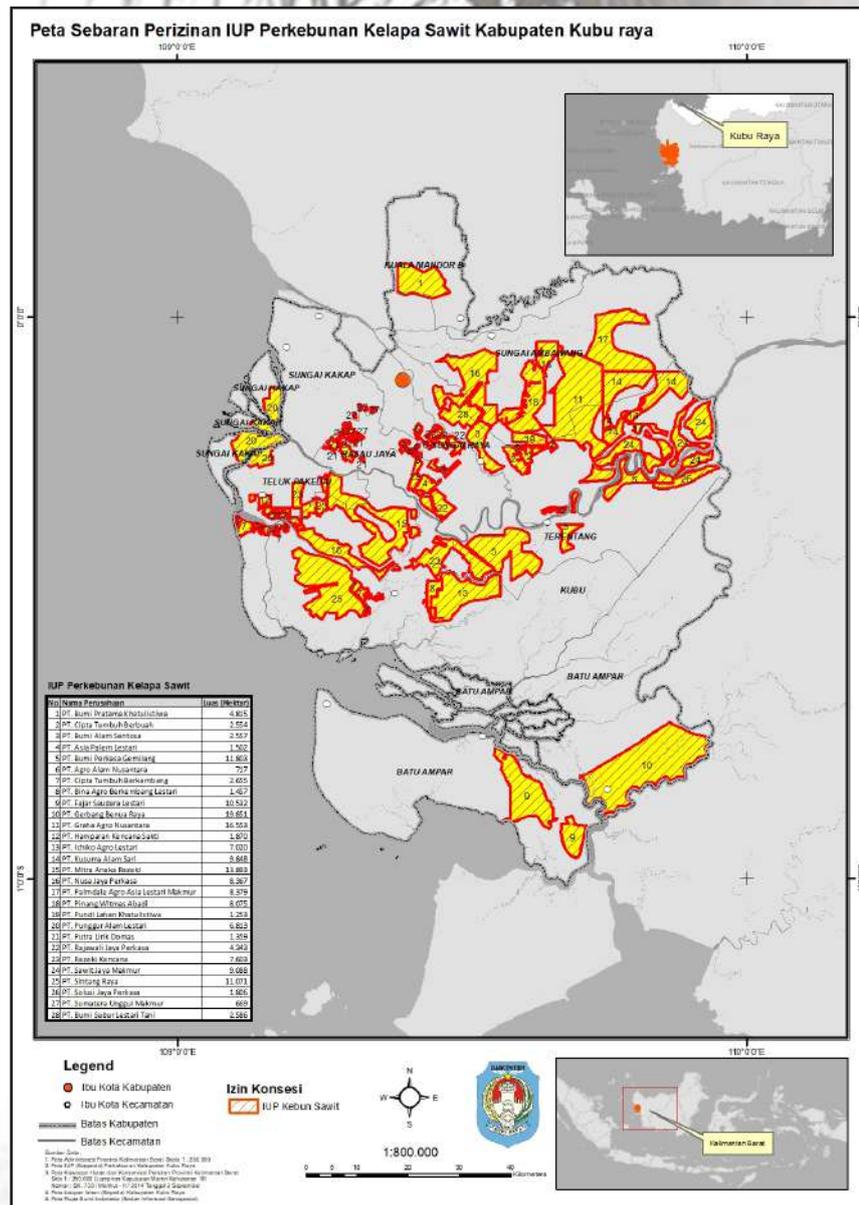
Pengangkutan hasil pemanenan Sawit, photo oleh Bapedda

## SAWIT BERKELANJUTAN

Sawit merupakan komoditas utama yang menopang ekonomi Kabupaten Kubu Raya. Luas Izin Usaha Perkebunan (IUP) sawit seluas 160.820,44 ha dan luas kebun inti dengan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 85.752,20 ha. Luas kebun Plasma di Kubu Raya adalah 29.834,99 ha yang dikelola oleh 16.526 petani plasma.<sup>13</sup> Sedangkan lahan sawit rakyat swadaya seluas 29.040 hektar.<sup>14</sup> Komoditas ini menyumbang 32,30% (10,09 triliun rupiah) terhadap total PDRB Kubu Raya tahun 2021 sebesar 31,23 triliun rupiah.<sup>15</sup>

Inisiatif sawit berkelanjutan berbasis yurisdiksi dikembangkan secara kolaboratif oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang didukung oleh sejumlah lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil. Inisiatif sawit berkelanjutan berbasis yurisdiksi ini menempatkan pemerintah kabupaten sebagai aktor utama dalam mendorong *sustainability* sawit dalam wilayah yurisdiksi.

Upaya kolaboratif ini diwujudkan dalam bentuk membangun komitmen bersama antar pihak, mengedukasi perusahaan sawit dan pabrik minyak sawit, meningkatkan kapasitas petani sawit mandiri, implementasi inisiatif konservasi berbasis HCV dan HCS, pemetaan partisipatif, penguatan kebijakan, dll.





## Informasi Program

- Pemerintah Kubu Raya sedang mendorong penguatan sawit berkelanjutan melalui upaya sertifikasi RSPO dan ISPO kepada pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit seluas 160.820,44 ha. Saat ini terdapat 6 perusahaan IUP yang sudah mendapatkan sertifikasi ISPO dari 27 pemegang IUP.
- Menerbitkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) kepada 1.000 petani sawit swadaya di tiga desa seluas 891,19 hektar.<sup>16</sup>
- Mempersiapkan 1.000 petani sawit swadaya untuk mendapatkan sertifikasi ISPO setelah memperoleh STDB seluas 891,19 ha. Mempersiapkan 1.370 petani sawit swadaya untuk mendapatkan STDB dan sertifikasi ISPO.<sup>17</sup>
- Peningkatan kapasitas kepada 2.370 petani sawit swadaya tentang pengelolaan sawit berkelanjutan, *Good Agricultural Practices* (GAP) dalam pengelolaan sawit, dan penguatan kelompok tani.



## Dampak Sosial dan Lingkungan

- Menyediakan lapangan kerja kepada 2.370 petani sawit swadaya.
- Menerapkan *Good Agricultural Practices* (GAP) di 891,19 hektar lahan sawit swadaya yang sudah mendapatkan STDB.
- Upaya penyelesaian konflik tenurial melalui program TORA.
- Menjaga kawasan hutan lindung seluas 143.152 hektar.<sup>18</sup>
- Melindungi 194.264 hektar hutan gambut untuk fungsi lindung (kubah gambut) yang berbatasan dengan IUP kelapa sawit dan perkebunan rakyat dari resiko kebakaran dan kerusakan lahan.<sup>19</sup>
- Menjaga ketinggian air pada jarak ideal antara permukaan tanah gambut dan tinggi muka air pada kedalaman 25 cm sampai 40 cm.<sup>20</sup>
- Mengurangi potensi deforestasi.



## Tata Kelola

Penguatan investasi sawit berkelanjutan berbasis yurisdiksi dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan pemerintah Kubu Raya (Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perkebunan, dan Bappedalitbang), korporasi swasta pemegang IUP kelapa sawit, dan masyarakat sipil, yakni IDH, GCF Taks Force, Pokja Percepatan Pertumbuhan Hijau, SIAR, ICRAF, dan lain-lain.



## Peluang Pengembangan

- Investasi sawit berkelanjutan masih terbuka peluang besar untuk dikembangkan di Kabupaten Kubu Raya, termasuk membangun Pabrik Kelapa Sawit baru.
- Mengejar target capaian 100% sertifikasi ISPO/RSPO untuk perusahaan pemegang IUP kelapa sawit dan petani plasma pada 2030, dan menerapkan praktek manajemen terbaik RSPO di kawasan gambut.
- Membangun sistem lacak terhadap rantai pasok minyak kelapa sawit, mencapai keterlacakan penuh hingga ke basis pasokan, untuk memastikan bebas deforestasi dan bebas gambut.
- Memperkuat peran Pokja PPPH (Percepatan Pelaksanaan Pertumbuhan Hijau) sebagai wadah multipihak dalam mendorong percepatan pertumbuhan hijau, terutama perbaikan tatakelola sawit berkelanjutan.
- Mempersiapkan STDB dan sertifikasi ISPO kepada 2.370 petani sawit swadaya di areal kebun seluas 29.040 hektar.
- Melakukan pendataan kebutuhan peremajaan sawit swadaya dalam rangka peningkatan produktivitas petani.
- Pemantapan RTRW dan Penyusunan RDTR sebagai upaya untuk dukungan sinergisitas pola pemanfaatan ruang.



## Peluang Investasi

US\$ 25.000.000 untuk lima tahun.

<sup>13</sup> Data Dinas Perkebunan Kubu Raya, 2022.

<sup>14</sup> Data Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Barat, 2022.

<sup>15</sup> Data BPS Kubu Raya, 2022. Kontribusi sawit melalui sektor industri pengolahan.

<sup>16</sup> Data Bappedalitbang Kubu Raya, 2022.

<sup>17</sup> Jumlah petani sawit swadaya di Kabupaten Kubu Raya adalah 2.370 orang petani.

<sup>18</sup> Data RTRW Kubu Raya 2016-2036.

<sup>19</sup> Sumber: Peta Kawasan Ekosistem Gambut (Kubah Gambut), KLHK.

<sup>20</sup> Nurhalimah, Ruslan, dan Suyanto, 2021, Analisis Tinggi Muka Air Tanah dan Pemetaannya di Lahan Gambut Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang Kalimantan Selatan, *Jurnal Silva Scientiae*, Vol. 4 No. 4, hal. 755.



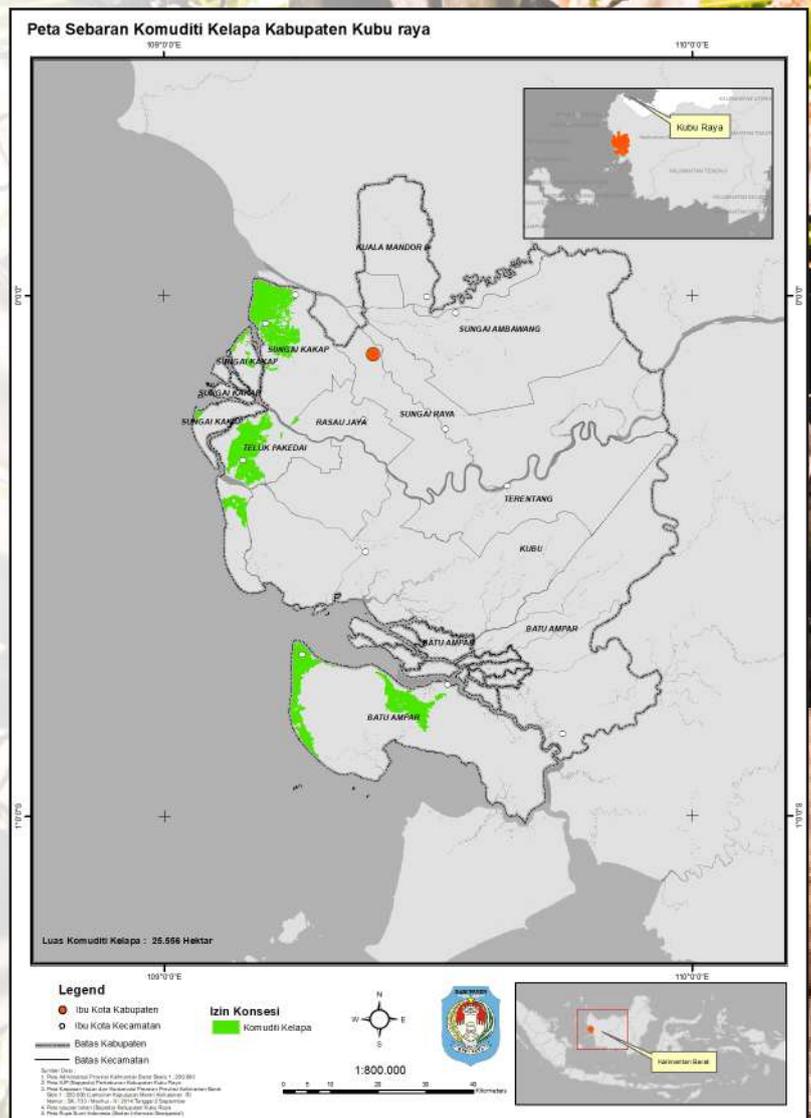
Proses panen kelapa dalam, photo oleh WWF Indonesia - - Viktor Fidelis Sentosa (Kopra)

## KELAPA DALAM

Kelapa Dalam merupakan salah satu komoditas perkebunan penting di Kabupaten Kubu Raya setelah kelapa sawit. Luas kebun kelapa dalam di kabupaten ini mencapai 34.284 hektar yang tersebar di semua kecamatan, dengan jumlah petani 10.506 orang. Produksi kelapa dalam mencapai 40.386 ton per tahun.<sup>21</sup>

Kelapa merupakan komoditas multifungsi, dimana semua bagian dari tanaman dan buah kelapa bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Selain dikonsumsi sehari-hari, komoditas kelapa dikembangkan oleh masyarakat menjadi berbagai produk, seperti diolah menjadi gula merah/gula semut, kopra, virgin coconut oil, cocovit, dan sebagainya.<sup>22</sup> Sabut kelapa juga berpotensi untuk digunakan oleh industri otomotif sebagai bahan pembuatan jok kursi mobil, dll.

Potensi investasi untuk komoditas kelapa dalam perlu dikembangkan lebih lanjut. Pendampingan dan peningkatan kapasitas petani kelapa dalam masih perlu terus diperkuat. Demikian juga pengembangan industri untuk mengolah kelapa menjadi berbagai produk turunan masih terbuka untuk dikembangkan di Kubu Raya.





## Informasi Program

- Luas budidaya: 34.284 hektar
- Produktivitas kelapa dalam: 40.386 ton per tahun
- Petani pembudidaya: 10.506 orang



## Dampak Sosial dan Lingkungan

- Menyediakan lapangan kerja untuk 10.506 petani.
- Menjaga ketinggian air pada jarak ideal antara permukaan tanah gambut dan tinggi muka air pada kedalaman 25 cm sampai 40 cm.
- Mengurangi potensi deforestasi dan intensifikasi budidaya kelapa dalam di lahan masyarakat.



## Tata Kelola

Pengelolaan kebun kelapa dalam selama ini masih dilakukan secara tradisional oleh petani kelapa dalam. Dinas Perkebunan melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas kelompok tani kelapa dalam. Sejumlah kelompok tani berhasil melakukan diversifikasi produk yang meningkatkan nilai tambah petani.



## Peluang Pengembangan

- Memperluas diversifikasi produk turunan dari komoditas kelapa dalam menjadi berbagai produk untuk meningkatkan nilai tambah.
- Meningkatkan kapasitas petani kelapa dalam untuk menerapkan pengelolaan kelapa berkelanjutan di kawasan gambut.
- Membangun kemitraan petani kelapa dalam dengan korporasi swasta untuk pengembangan produk skala industri.



## Peluang Investasi

US\$ 2.500.000 untuk lima tahun.

<sup>21</sup> Data Dinas Perkebunan Kubu Raya, 2022.

<sup>22</sup> Petani biasanya menjual langsung kelapa kepada pengepul atau kepada pabrik pengolahan kelapa di Mempawah, yakni PT. Unicoco dan PT. Kalimantan Kelapa Jaya. PT Unicoco mengolah kelapa menjadi berbagai produk seperti santan, coconut butter, dan crude coconut oil. Lihat laporan USAID SEGAR: Kajian Pemetaan Rantai Pasok Komoditas Kelapa di Kabupaten Kubu Raya, 2022.

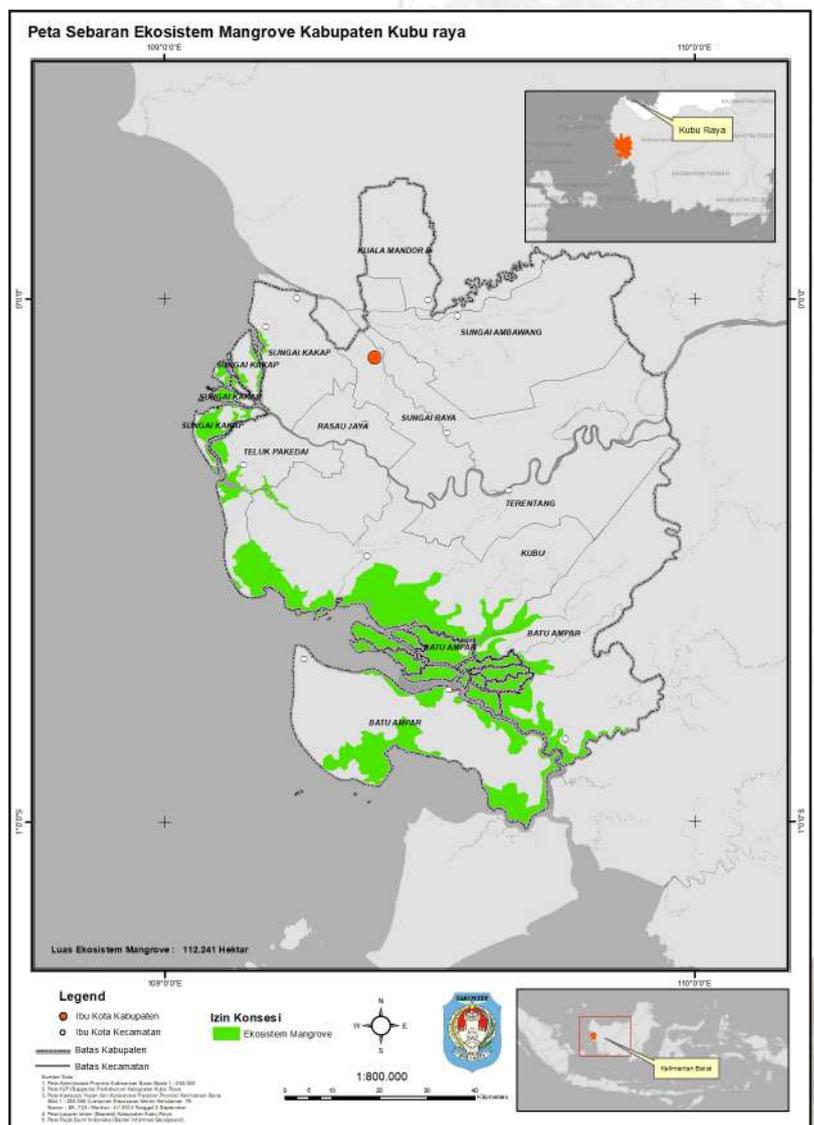


Wisata hutan mangrove batang beteng dabong, photo oleh Bapedda

## PENGELOLAAN MANGGROVE BERKELANJUTAN: EKOWISATA

Mangrove merupakan ikon Kubu Raya. Kabupaten ini mempunyai kawasan hutan mangrove terluas di Kalimantan Barat, yakni 132.887,81 hektar atau 75,84% dari total luas mangrove di Kalimantan Barat. Kabupaten Kubu Raya juga mempunyai panjang garis pantai 194 km dan 43 pulau kecil. Pemerintah Kubu Raya memberi perhatian khusus dalam pengelolaan mangrove secara seimbang untuk mendukung ekonomi lokal dan perlindungan ekosistem. Mangrove di Kubu Raya terdiri dari 67 spesies, termasuk 1 spesies mangrove langka dan terancam punah yang ditetapkan oleh IUCN, yakni spesies Tumuk Putih atau Berus Mata Buaya (*Bruguiera hainesii*).

Untuk menjaga kelestarian kawasan hutan mangrove, pemerintah bersama sejumlah perusahaan (seperti PT. Kandelia Alam) dan CSO (WWF, Sampan Kalimantan, dan CCDP-IFAD) mengembangkan ekowisata mangrove di sejumlah lokasi strategis di Kubu Raya. Pengembangan ekowisata mangrove dilakukan untuk memperkuat keseimbangan antara proteksi untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove di satu sisi dan produksi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau di kabupaten ini.





## Informasi Program

Ekowisata mangrove yang sudah dikembangkan oleh masyarakat, yang didukung oleh pemerintah Kubu Raya, sejumlah CSO dan perusahaan adalah:

- Ekowisata Pantai Tengkyung, Desa Sungai Nibung, Kecamatan Teluk Pakedai. Pengembangan ekowisata ini didukung oleh CCDP-IFAD.
- Ekowisata Bentang Pesisir Padang Tikar, Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, yang pengembangannya difasilitasi oleh SAMPAN Kalimantan.
- Ekowisata Kandelia Alam (PT. Kandelia Alam) berada di dua desa, yakni Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar dan Desa Kubu Kecamatan Kubu. WWF Indonesia membantu fasilitasi pengembangan ekowisata ini.
- Ekowisata Telok Berdiri Sungai Kupah, Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap.
- Ekowisata Mangrove Beteng Batang, Desa Dabong, Kecamatan Kubu.
- Equator Park Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap.
- Ekowisata PT. Ekosistem Khatulistiwa Lestasi (EKL).
- Ekowisata PT. MRU
- Ekowisata yang dikembangkan oleh sejumlah HPHD yang mempunyai kawasan mangrove.

Untuk mendukung ekowisata mangrove, masyarakat desa juga mengembangkan berbagai produk pendukung lainnya, seperti madu kelulut, kepiting bakau (*Seila serrata*), kerupuk kepiting, sirup mangrove, dll.



## Dampak Sosial dan Lingkungan

- Menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat di 6 desa yang mengembangkan ekowisata mangrove.
- Melakukan perlindungan terhadap 67 spesies mangrove, termasuk 2 spesies langka dan terancam punah, yakni Tumuk Putih atau Berus Mata Buaya (*Bruguiera Hainesii*) dan *Kandelia candel*.
- Melakukan perlindungan terhadap kawasan hutan mangrove seluas 132.887,81 hektar dari berbagai ancaman kerusakan.



## Tata Kelola

Di beberapa desa, kolaborasi multipihak berjalan dengan baik dalam pengembangan ekowisata mangrove, yang melibatkan CCDP-IFAD, Sampan Kalimantan, dan WWF Indonesia. Di beberapa lokasi ekowisata mangrove, masyarakat desa mengembangkan ekowisata secara mandiri, namun tetap dibantu oleh pemerintah Kubu Raya dalam berbagai aspek, termasuk promosi, peningkatan kapasitas pengelola, dll.



## Peluang Pengembangan

- Dengan luas kawasan mangrove mencapai 132.887,81 hektar, peluang pengembangan ekowisata mangrove masih terbuka lebar, termasuk pengembangan silvofishery dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di kawasan mangrove.
- Meningkatkan kapasitas pengelola ekowisata mangrove dalam berbagai aspek untuk menaikkan nilai jual ekowisata dan memperluas pasar.
- Meningkatkan jumlah desa yang mempunyai potensi ekowisata mangrove untuk dikembangkan.
- Pembangunan infrastruktur pendukung ekowisata, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta.



## Peluang Investasi

US\$ 15.000.000 untuk lima tahun.



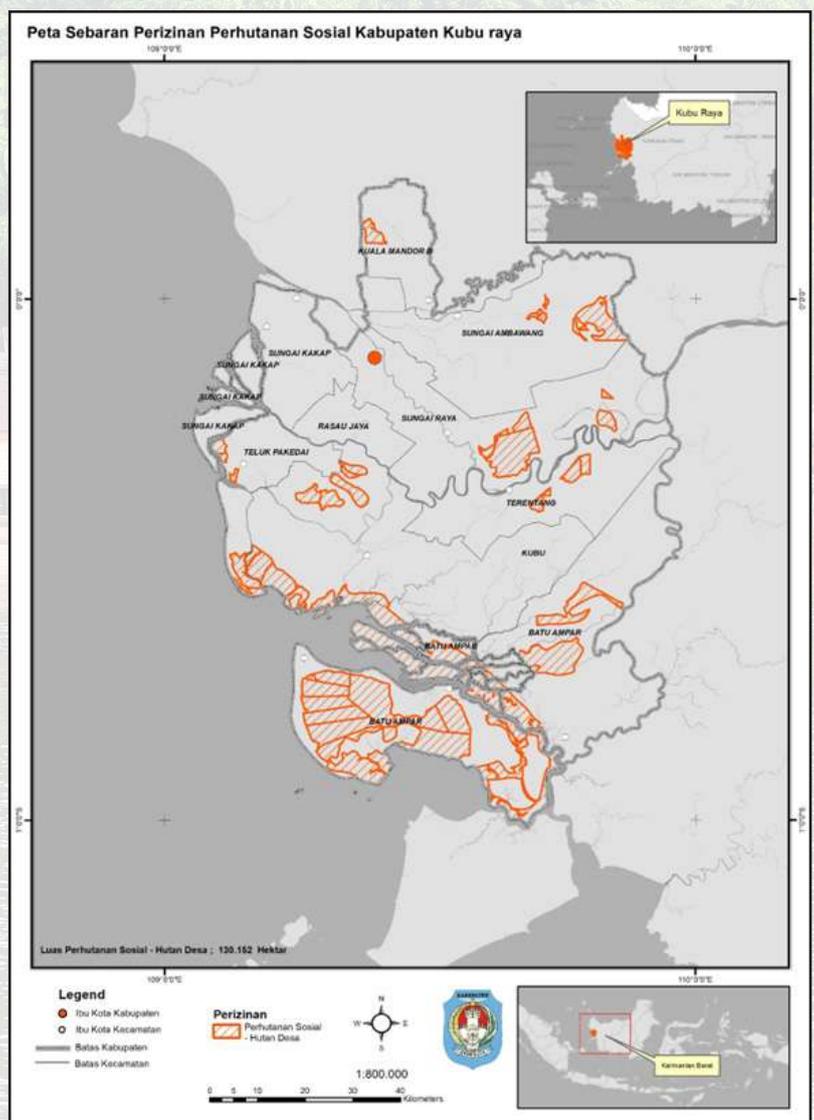
Kawasan Hutan Mangrove, photo oleh Bapedda

## JASA LINGKUNGAN DARI HUTAN DESA

Hutan Desa merupakan salah satu skema Perhutanan Sosial (PS) yang memberikan hak pengelolaan hutan negara kepada masyarakat desa, yang dikenal dengan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Sebanyak 31 HPHD di Kubu Raya telah ditetapkan oleh KLHK dari tahun 2017 sampai 2021 yang tersebar di 6 kecamatan, dengan total luas 121.863 hektar.<sup>23</sup>

HPHD memberi ruang kepada masyarakat desa untuk bisa mengelola hutan negara melalui pengembangan jasa lingkungan dan karbon. Dari 121.863 hektar kawasan HPHD di Kubu Raya, tutupan hutan mencapai 93.929 hektar. Dengan tutupan hutan mencapai 77%, maka potensi perdagangan karbon akan cukup besar.

Selain pemerintah Kubu Raya, sejumlah lembaga donor dan CSO terlibat secara kolaboratif dalam memperkuat Perhutanan Sosial melalui skema HPHD. Upaya peningkatan kapasitas pengelola HPHD terus dilakukan, termasuk membangun keterhubungan dengan pasar karbon internasional.





## Informasi Program

- Luas Hak Pengelolaan Hutan Desa mencapai 121.863 hektar, dimana tutupan hutan seluas 93.929 hektar.
- Potensi pendanaan dengan skema jasa lingkungan mencapai Rp 65.750.509.464 per tahun, dengan asumsi potensi pendanaan US\$50/ha/tahun.
- Potensi pendanaan dengan skema perdagangan karbon mencapai Rp 26.770.123.018 per tahun, dengan asumsi harga karbon US\$10/tCO<sub>2</sub>e/tahun. HPHD Kubu Raya mampu menyerap 191.215 tCO<sub>2</sub>e/tahun.



## Dampak Sosial dan Lingkungan

- Menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di 31 desa.
- Melakukan perlindungan dari kerusakan dan kebakaran terhadap 93.929 hektar kawasan HPHD yang masih berhutan, terdiri dari 3,7% hutan lahan kering sekunder, 46,3% hutan mangrove sekunder, dan 50% hutan rawa sekunder.<sup>24</sup>
- Menjaga ketinggian air pada jarak ideal antara permukaan tanah gambut dan tinggi muka air pada kedalaman 25 cm sampai 40 cm.



## Tata Kelola

Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) dibentuk dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) untuk mengelola Hutan Desa. Sebanyak 31 LPHD melakukan pengelolaan Hutan Desa di 31 desa. Pemerintah Kubu Raya didukung secara kolaboratif oleh sejumlah lembaga donor dan CSO, melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada 31 LPHD di Kubu Raya.



## Peluang Pengembangan

- Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sudah dibentuk di 31 desa untuk mengembangkan bisnis berbasis Hutan Desa.
- Kemitraan untuk perluasan pasar karbon Hutan Desa perlu di perkuat untuk tingkat nasional dan internasional, yang melibatkan pemerintah, sektor swasta dan CSO.
- Meningkatkan kapasitas desa dan LPHD dalam pengelolaan Hutan Desa untuk memperbaiki produktivitas Hutan Desa, baik produktivitas ekologi maupun ekonomi lokal berkelanjutan.



## Peluang Investasi

US\$ 30.840.000 untuk lima tahun.

<sup>23</sup> Data Pokja PPH Kubu Raya, 2022.

<sup>24</sup> Data diolah oleh tim GIS.



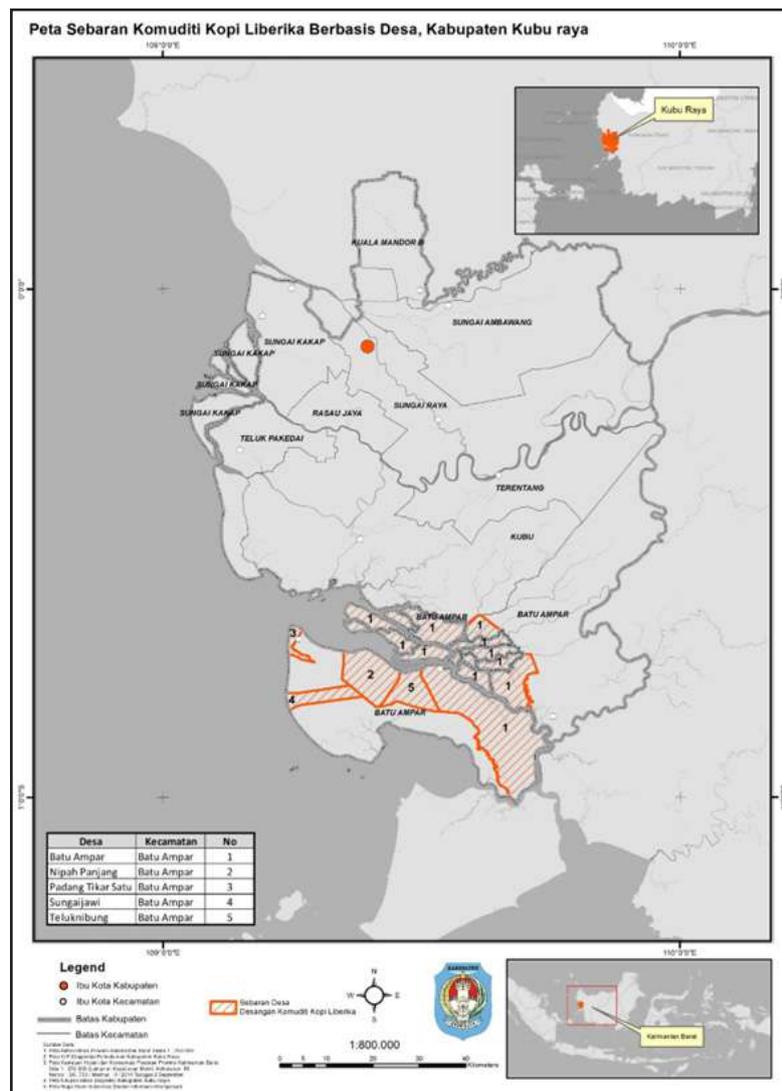
Komoditas Kopi Liberika, photo oleh Arief F Rachman

## PENGELOLAAN GAMBUT BERKELANJUTAN: KOPI LIBERIKA

Kopi Gambut atau dikenal dengan Kopi Liberika merupakan salah satu kopi yang tumbuh di lahan gambut. Di Kubu Raya, kebun kopi liberika mempunyai luas 1.167 hektar, dengan jumlah petani 1.114 orang. Pada tahun 2019, produksi kopi liberika mencapai 1.369 ton, kemudian menurun menjadi 744 ton tahun 2021 karena faktor covid-19.<sup>25</sup> Kopi liberika ini tersebar di beberapa desa di Kecamatan Batu Ampar, yakni Desa Batu Ampar, Padang Tikar, Teluk Nibung, Sungai Jawi, dan Desa Nipang Panjang.

Saat ini, kopi liberika masih dikelola dalam skala kecil oleh petani. Pemerintah Kubu Raya bersama sejumlah lembaga donor dan CSO terus memperkuat kapasitas petani kopi liberika, termasuk dalam peningkatan produktivitas, kualitas, dan pengemasan produk sebelum dijual ke pasar. Selain pasar lokal dan dalam negeri, saat ini kopi liberika juga telah menembus pasar mancanegara.

Kolaborasi dengan sektor swasta sangat diperlukan untuk memperbesar skala bisnis kopi liberika. Saat ini, sebuah perusahaan swasta PT. Hakikat Arwana Suskes (HAS) sedang membangun kerjasama dengan sejumlah HPDH yang mempunyai kawasan untuk pengembangan kopi liberika. PT. HAS dan HPDH sudah menanam 90 ha kopi liberika dari 2.700 ha yang direncanakan, serta melibatkan sekitar 200 petani kopi. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian diperlukan untuk mendapatkan spesies unggul kopi liberika di Kubu Raya.



<sup>25</sup> Data Dinas Perkebunan Kubu Raya, 2022.



## Informasi Program

- Luas lahan budidaya petani: 1.167 hektar
- Luas lahan budidaya PT HAS dan HPHD: 2.700 ha, 90 ha sudah ditanam
- Produktivitas kopi liberika: 744 ton per tahun
- Petani pembudidaya: 1.114 petani di 5 desa, dan 200 petani kemitraan PT HAS dan HPHD



## Dampak Sosial dan Lingkungan

- Menyediakan lapangan kerja kepada 1.114 petani kopi liberika.
- Melakukan perlindungan lahan gambut dari kebakaran dan kerusakan, khususnya di wilayah budidaya kopi liberika seluas 1.167 hektar.
- Menjaga ketinggian air pada jarak ideal antara permukaan tanah gambut dan tinggi muka air pada kedalaman 25 cm sampai 40 cm.



## Tata Kelola

Dinas Perkebunan Kubu Raya melakukan pembinaan terhadap petani kopi liberika di 5 desa. Sejumlah pelatihan dan pendampingan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas petani tentang praktek pertanian berkelanjutan di lahan gambut, pengelolaan kopi liberika secara berkelanjutan, dan peningkatan kualitas produk kopi liberika.

Di sisi lain, PT. Hakikat Arwana Suskes (HAS) bekerjasama dengan sejumlah pengelola HPHD (Hak Pengelolaan Hutan Desa) sedang mengembangkan kopi liberika di lahan gambut Hutan Desa seluas 2.700 ha, dimana 90 ha sudah di tanam.



## Peluang Pengembangan

- Menyediakan lapangan kerja kepada 1.114 petani kopi liberika.
- Perluasan pasar di dalam dan luar negeri melalui peningkatan kualitas produk dan promosi melalui berbagai media.
- Meningkatkan kapasitas petani kopi dalam melaksanakan praktek pertanian terbaik (*Good Agricultural Practices*) dalam pengelolaan kopi dan gambut berkelanjutan.
- Kemitraan petani, sektor swast

## Peluang Investasi

US\$ 1.000.000.000 untuk lima tahun.







## Informasi Program

- Luas lahan budidaya untuk paludikultur mencapai 52.857,56 hektar.
- Jenis komoditas yang dibudidayakan sebanyak 7 jenis tanaman utama hortikultura, termasuk jagung, cabe, jahe, kunyit, pepaya, buah naga, serai wangi. Dalam kawasan pertanian terpadu juga dikembangkan peternakan sapi dan ayam.
- Petani pembudidaya berada di 7 desa KPPN (Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional) Agropolitan Rasau Raya, 9 desa dalam KPPT (Kawasan Pedesaan Pertanian Terpadu) Sungai Kakap, KPPT Desa Sumber Agung, Kecamatan Batu Ampar, dan KPPT Kecamatan Terentang.



## Dampak Sosial dan Lingkungan

- Menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat di 7 desa KPPN Rasau Raya, 9 desa KPPT Sungai Kakap, KPPT Desa Sumber Agung, dan KPPT Kecamatan Terentang.
- Melakukan perlindungan lahan gambut dari kebakaran dan kerusakan seluas 52.857,56 hektar.
- Menjaga ketinggian air pada jarak ideal antara permukaan tanah gambut dan tinggi muka air pada kedalaman 25 cm sampai 40 cm.



## Tata Kelola

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada desa-desa yang mengembangkan budidaya paludikultur di wilayah KPPN (Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional) dan KPPT (Kawasan Pedesaan Pertanian Terpadu). Karena berada di lahan gambut, optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lahan gambut menjadi penting. Pemda Kubu Raya melakukan sejumlah pelatihan kepada masyarakat desa, antara lain (1) Pelatihan kesiapsiagaan karhutla, (2) Pelatihan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar, (3) Pelatihan pengelolaan lahan gambut melalui pengembangan ekonomi lokal oleh BUMDes dan BUMDesma.

## Peluang Pengembangan



- Meningkatkan produktivitas komoditas paludikultur di lahan seluas mencapai 52.857,56 ha melalui berbagai penelitian di Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional dan Kawasan Pedesaan Pertanian Terpadu.
- Memperluas akses pasar komoditas paludikultur ke luar Kubu Raya dan Kalimantan Barat, termasuk meningkatkan kualitas produk.
- Meningkatkan praktek pertanian berkelanjutan (*GAP - Good Agricultural Practices*) di lahan gambut untuk mencegah kerusakan lahan gambut yang menjadi lokasi budidaya komoditas paludikultur.



## Peluang Investasi

US\$ 15.000.000 untuk lima tahun





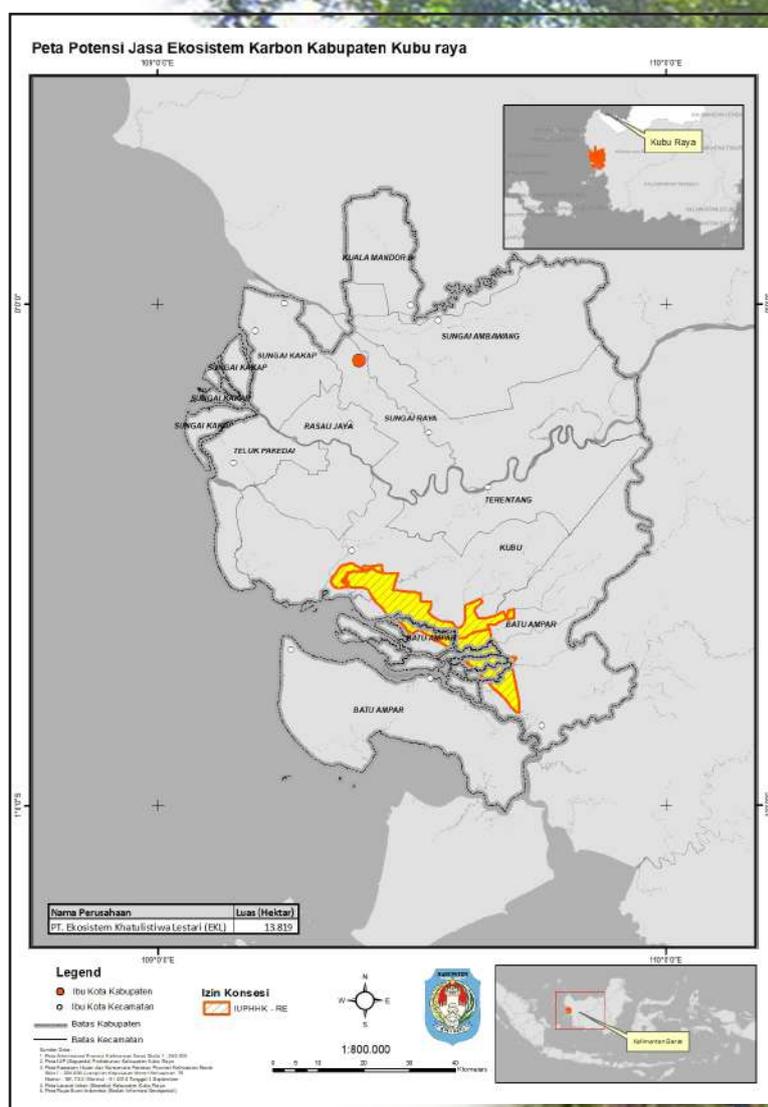
Kawasan Hutan, photo oleh Bapedda

## RESTORASI EKOSISTEM DAN MULTIUSAHA KEHUTANAN

Restorasi Ekosistem (RE) menjadi pendekatan baru dalam investasi berkelanjutan di sektor kehutanan. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Restorasi Ekosistem<sup>26</sup> ini diberikan untuk membangun kawasan hutan yang memiliki ekosistem penting dan unik, seperti gambut dan mangrove di Kubu Raya. Tahun 2021, PBB telah menetapkan agenda Dekade Restorasi Ekosistem (*UN Decade on Ecosystem Restoration*) 2021-2030. Agenda global ini membuka babak baru dalam mengembalikan kondisi ekosistem hutan yang terdegradasi dalam skala besar sehingga meningkatkan ketahanan ekologi dan produktivitas.

Sebanyak tiga perusahaan restorasi ekosistem (RE) menjalankan peran dan fungsinya di Kubu Raya dalam areal total seluas 42.310 hektar.<sup>27</sup> Meskipun perizinan untuk RE berada di pemerintah pusat (KLHK), namun pelaksanaan program multiusaha kehutanan membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan desa, sehingga RE dan multiusaha kehutanan dapat menjadi bagian skema investasi yurisdiksi.

Kegiatan usaha yang diizinkan dalam kawasan RE adalah pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan, termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Selain itu, juga bisa dikembangkan multiusaha kehutanan, termasuk ekowisata, perdagangan karbon, dan lain-lain.



<sup>26</sup> UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja menggabungkan semua perizinan kehutanan menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan). Dalam PBPH, perizinan Restorasi Ekosistem (RE) dilebur menjadi satu izin dengan HPH dan HTI bersama izin-izin pemanfaatan hasil hutan lainnya, termasuk usaha perdagangan karbon, yang disebut dengan multiusaha kehutanan.

<sup>27</sup> Data Dinas LHK Kalimantan Barat, 2022.



## Informasi Program

- Luas lahan Restorasi Ekosistem: 42.310 hektar
- Jumlah perusahaan Restorasi Ekosistem: 3 perusahaan



## Dampak Sosial dan Lingkungan

- Menyediakan lapangan pekerjaan kepada 100 orang karyawan perusahaan, dan 500 warga desa yang terlibat dalam berbagai kegiatan restorasi, kemitraan, dan CSR perusahaan.
- Melakukan perlindungan 194,264 hektar lahan gambut untuk fungsi lindung (kubah gambut).
- Menjaga ketinggian air pada jarak ideal antara permukaan tanah gambut dan tinggi muka air pada kedalaman 25 cm sampai 40 cm.



## Tata Kelola

Sebanyak tiga perusahaan mendapatkan PBPH Restorasi Ekosistem di Kubu Raya, yakni PT. Bina Ovivivari Semesta seluas 10.100 ha (izin tahun 2006), PT. Kandelia Alam seluas 18.130 ha (izin tahun 2008), dan PT. Ekosistem Khatulistiwa Lestasi seluas 14.080 ha (izin tahun 2011). Bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sejumlah lembaga internasional dan CSO lokal terlibat dalam program kemitraan dengan perusahaan RE, termasuk Borneo-Initiative, IDH, WWF Indonesia, Convergence, USAID SEGAR.



## Peluang Pengembangan

- Restorasi Ekosistem akan menjadi salah satu pendekatan investasi penting ke depan dalam rangka memulihkan degradasi ekosistem untuk meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan multiusaha kehutanan.
- Kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan CSO akan sangat strategis dalam meningkatkan investasi Restorasi Ekosistem dengan pendekatan yurisdiksi.
- Meningkatkan restorasi ekosistem gambut sebesar 50% di Kubu Raya pada tahun 2030.
- Dengan pendekatan PBPH, pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk menjalankan restorasi ekosistem di kawasan gambut di Kubu Raya, dalam rangka meningkatkan produktivitas kawasan hutan, restorasi kawasan yang rusak, dan melakukan konservasi terhadap satwa liar yang dilindungi, termasuk orang utan dan bekantan.



## Peluang Investasi

US\$ 50.000.000 untuk lima tahun.

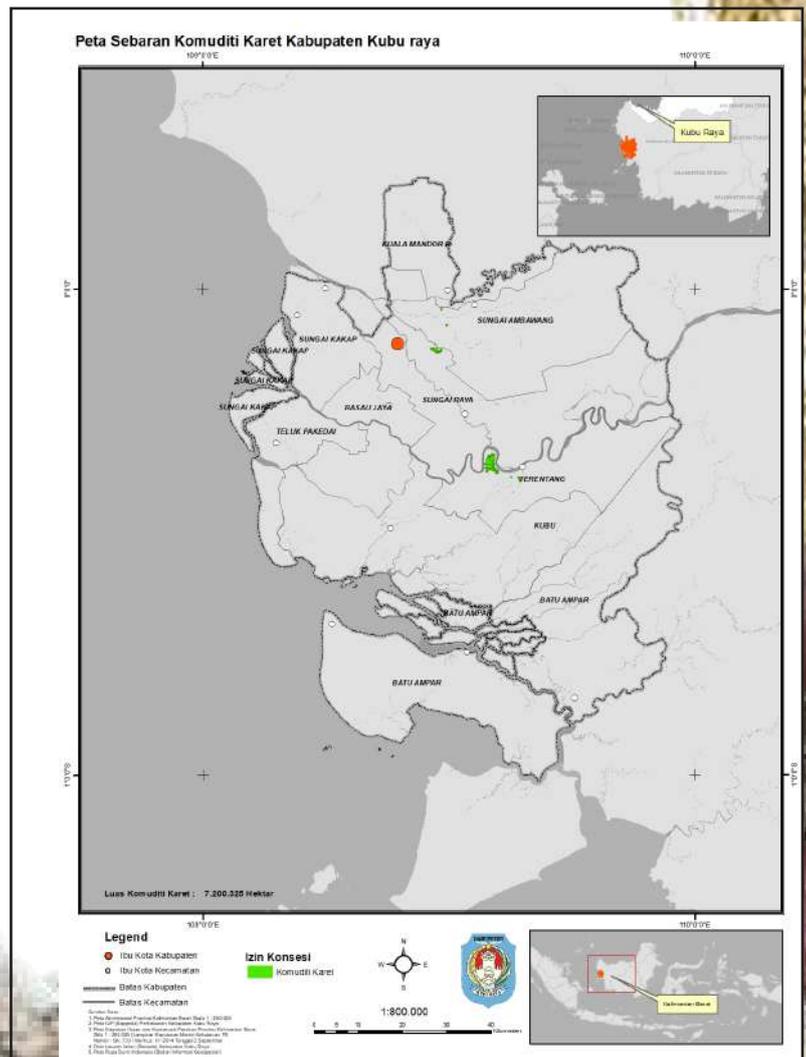


Proses panen karet, photo oleh Medcom.id

## KARET BERKELANJUTAN

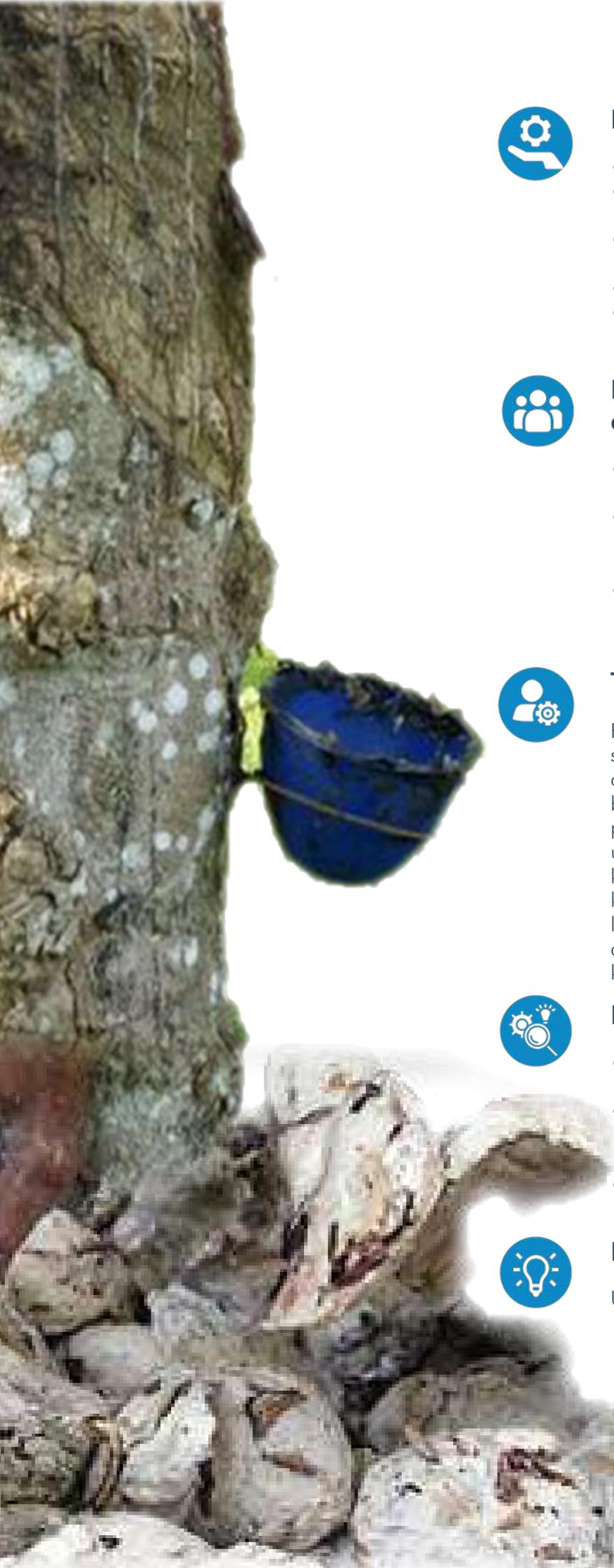
Karet merupakan salah satu produk perkebunan Kubu Raya yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Selama ini, karet dikelola secara tradisional oleh masyarakat Kubu Raya. Dinas Perkebunan Kubu Raya melakukan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas karet rakyat seperti penyuluhan kepada petani karet, peremajaan kebun tua dan tidak produktif, penyediaan bibit unggul, serta akses permodalan kepada petani karet.

Tingkat produktivitas karet rakyat di Kubu Raya cenderung masih rendah, yakni 700 kg karet kering per ha/tahun. Sementara produktivitas karet rata-rata nasional mencapai 900 sampai 1.000 kg per ha/tahun. Sedangkan di Thailand mencapai 1.800 kg per ha/tahun.<sup>28</sup> Peningkatan produktivitas bisa dilakukan melalui kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, selain peran pemerintah sebagai regulator dalam wilayah yurisdiksi. Saat ini terdapat 5 perusahaan<sup>29</sup> yang melakukan pengolahan karet remah (crumb rubber). Perusahaan-perusahaan ini menerima bahan baku karet dari masyarakat.



<sup>28</sup> Data Dinas Perkebunan Kubu Raya, 2022.

<sup>29</sup> Data Dinas Perindustrian Kubu Raya, 2022.



## Informasi Program

- Luas lahan budidaya: 17.848 hektar.
- Produktivitas lahan karet: 14.652 ton tahun 2021.
- Produktivitas karet kering: 700 kg karet kering/ha/tahun.
- Petani pembudidaya: 6.445 orang.
- Industri pengolah karet remah (*crumb rubber*): 5 perusahaan



## Dampak Sosial dan Lingkungan

- Menyediakan lapangan kerja kepada 6.445 petani karet.
- Melakukan perlindungan 194,264 hektar lahan gambut untuk fungsi lindung (kubah gambut) di sekitar lahan kebun karet.
- Menjaga ketinggian air pada jarak ideal antara permukaan tanah gambut dan tinggi muka air pada kedalaman 25 cm sampai 40 cm.



## Tata Kelola

Pengelolaan karet masih dilakukan oleh petani secara tradisional. Peran pemerintah cukup penting dalam mendukung bisnis karet berkelanjutan, baik dalam penyediaan berbagai infrastruktur pendukung, penyuluhan, penyediaan bibit unggul, sampai menyediakan akses permodalan kepada petani. Keterlibatan sektor swasta secara kolaboratif dengan petani karet masih terbuka lebar dalam investasi karet berkelanjutan ini, baik di hulu maupun hilir melalui pengembangan pabrik karet di Kubu Raya.



## Peluang Pengembangan

- Menyediakan lapangan kerja kepada 6.445 petani karet.
- Memperkuat akses keuangan melalui perbankan dan non perbankan kepada petani karet.
- Meningkatkan produktivitas kering menjadi di atas 1.000 kg per ha/tahun pada 2025.



## Peluang Investasi

US\$ 12.000.000 dalam lima tahun.

# KONTRIBUSI PADA STRATEGIS PERCEPATAN PERTUMBUHAN HIJAU KUBU RAYA

---

## STRATEGI PERCEPATAN PERTUMBUHAN HIJAU KUBU RAYA

Kabupaten Kubu Raya telah menyusun sebuah dokumen strategi dan aksi untuk mendukung percepatan pertumbuhan hijau di wilayah ini. Dokumen ini bernama Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Pertumbuhan Hijau (SRAK PPH). SRAK PPH Kabupaten Kubu Raya merupakan strategi operasional untuk mempercepat pertumbuhan hijau. Sebanyak tujuh strategi dimuat dalam dokumen ini, yakni sebagai berikut:

1. Mendorong perlindungan dan pengamanan hutan untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan, serta kebakaran hutan dan lahan;
2. Melakukan restorasi dan konservasi di areal yang terdegradasi guna memberikan nilai manfaat tambahan kepada masyarakat;
3. Mendorong legalitas perlindungan di areal berhutan di KH dan APL;
4. Meningkatkan produktivitas komoditas kunci di Kabupaten Kubu Raya sehingga berkontribusi pada peningkatan PDRB.
5. Menciptakan insentif dan nilai tambah dalam rantai pasok komoditas;
6. Memperkuat tata kelola kelembagaan di tingkat yurisdiksi untuk mendukung SRAK PPH Kubu Raya;
7. Meningkatkan akses terhadap pendanaan inovatif di Kabupaten Kubu Raya.

# STRATEGI 1.

Mendorong perlindungan dan pengamanan hutan untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan, serta kebakaran hutan dan lahan



Kawasan hutan mangrove, photo oleh Bappeda

## Sawit Berkelanjutan

Memperkuat pendekatan kolaborasi multipihak dalam mendorong perlindungan hutan (kawasan gambut dan mangrove) untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, termasuk di areal perkebunan sawit dan sawit rakyat swadaya.

Membangun sistem pemantauan, verifikasi, dan respon untuk deforestasi, degradasi dan kebakaran gambut di areal IUP dan sawit swadaya, paling lambat tahun 2028. Memperkuat praktek sawit berkelanjutan kepada 27 perusahaan pemegang IUP sawit (khususnya 21 perusahaan yang belum mempunyai sertifikasi ISPO/RSPO) seluas 162.175,93 ha, dan areal sawit rakyat swadaya seluas 29.040 ha, selambatnya tahun 2028.

Stok karbon Kubu Raya adalah sebesar 188.344.330 tCO<sub>2</sub>e.<sup>30</sup> Perlu upaya kolaboratif untuk menurunkan emisi Kubu Raya, yakni (1) rata-rata emisideforestasi menurun menjadi 2.216.534 tCO<sub>2</sub>e/tahun, (2) rata-rata emisi degradasi menurun menjadi 2.677 tCO<sub>2</sub>e/tahun, dan (3) rata-rata emisi dekomposisi gambut menurun menjadi 2.107.731 tCO<sub>2</sub>e/tahun.<sup>31</sup>

Mendorong perusahaan untuk mempunyai sistem *sustainability* (ESG—*Environmental, Social, and Governance*), terutama mempertegas perlindungan hak azasi manusia kepada pekerja dan masyarakat sekitar hutan, tidak mempekerja anak di bawah umur, dan memberi hak afirmatif kepada pekerja perempuan.

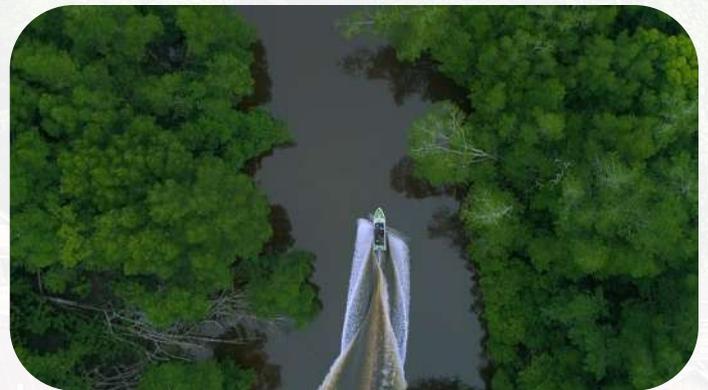
## Kelapa Dalam

Memperkuat tatakelola kelapa dalam melalui penerapan praktek pertanian yang baik, peningkatan kapasitas petani kelapa, serta memastikan pengelolaan kelapa yang bebas deforestasi dan kebakaran lahan gambut.

## Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan: Ekowisata

Secara kolaboratif multipihak, memperbaiki tatakelola ekowisata berkelanjutan di wilayah mangrove, sehingga bisa mencegah 132.887,81 ha mangrove dari kerusakan dan deforestasi.

Meningkatkan kapasitas masyarakat dan parapihak pengelola ekowisata mangrove untuk memperkuat konservasi mangrove, menjaga 67 spesies mangrove dari kerusakan, termasuk 1 spesies mangrove langka dan terancam punah yang terdapat di Kubu Raya, yakni spesies Temu Putih atau Berus Mata Buaya (*Bruguiera hainesii*).



Wisata susur sungai hutan mangrove desa sungai nibung, photo oleh Bappeda

## Hutan Desa untuk Jasa Lingkungan dan Perdagangan Karbon

Meningkatkan kapasitas pengelola HPHD dalam menjaga stok karbon di wilayah Hutan Desa dari deforestasi, degradasi dan kebakaran hutan di areal seluas 121.863 ha dengan tutupan hutan mencapai 77%.

<sup>30</sup>Data yang dihitung oleh tim peneliti dan penyusun Outlook Investasi Kubu Raya.

<sup>31</sup>Data SRAK-PPH Kubu Raya, 2020.



Biji kopi liberika, photo oleh Arief F Rachman

### Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Kopi Liberika

Mempercepat penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kubu Raya yang akan menjadi landasan dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pengelolaan gambut. RPPEG diharapkan selesai paling lambat tahun 2023.

Menerapkan praktek pertanian yang baik, tatakelola lahan dan tatakelola air pada lahan gambut yang menjadi areal perkebunan kopi liberika seluas 1.167 ha.

### Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Budidaya Paludikultur

Mempercepat penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kubu Raya yang akan menjadi landasan dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pengelolaan gambut. RPPEG diharapkan selesai paling lambat tahun 2023.

Mendukung pengembangan berbagai tanaman paludikultur di lahan gambut secara berkelanjutan dan seimbang antara kepentingan ekologis dan manfaat kepada masyarakat, serta mempraktekkan pertanian yang baik dalam rangka mengurangi resiko kerusakan dan kebakaran gambut.



Wisata mangrove telok bediri, photo oleh Bappeda

### Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan: Restorasi Ekosistem

Mengurangi deforestasi hutan mangrove dengan melakukan penguatan pada satuan pengamanan hutan, melakukan monitoring terhadap potensi deforestasi mangrove di areal Restorasi Ekosistem seluas 42.310 ha.



Hasil getah karet, photo oleh Ekonomi-Bisnis.com

### Karet Berkelanjutan

Meningkatkan produktivitas tanaman karet rakyat dalam menyerap emisi karbon sampai 35 tCO<sub>2</sub>e/ha/tahun dan melepas oksigen sampai 13 ton O<sub>2</sub>/ha/tahun.

Menerapkan praktek pertanian berkelanjutan, tatakelola lahan, dan meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah perkebunan karet rakyat.

## STRATEGI 2.

Melakukan restorasi dan konservasi di areal yang terdegradasi guna memberikan nilai manfaat tambahan kepada masyarakat

### Sawit Berkelanjutan

Melakukan perlindungan keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna dilindungi dan terancam punah, pada areal dengan HCV (*High Conservation Value*) dan HCS (*High Carbon Stock*) di areal perusahaan pemegang IPU seluas 162.175,93 ha, dan areal sawit rakyat swadaya seluas 29.040 ha.

Menurunnya jumlah hotspot kebakaran hutan gambut menjadi 264 hotspot/tahun, dan luas areal agregat terbakar menurun menjadi 8.919 ha/tahun selambatnya tahun 2025.<sup>32</sup>

### Kelapa Dalam

Meningkatkan kapasitas petani kelapa dalam mempraktekkan tatakelola pertanian berkelanjutan, mencegah kerusakan dan kebakaran gambut di wilayah perkebunan kelapa rakyat.

### Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan: Ekowisata

Memperkuat konservasi 67 spesies mangrove dari kerusakan, termasuk 1 spesies mangrove langka dan terancam punah yang terdapat di Kubu Raya, yakni spesies Temu Putih atau Berus Mata Buaya (*Bruguiera hainesii*).

Melakukan edukasi kepada masyarakat, pengelola ekowisata dan pengunjung ekowisata tentang konservasi mangrove, perlindungan keanekaragaman hayati dalam ekosistem mangrove, serta bagaimana menyeimbangkan kepentingan ekologi dan pengembangan ekonomi masyarakat.

### Hutan Desa untuk Jasa Lingkungan dan Perdagangan Karbon

Hutan Desa dengan total luas 121.863 ha mempunyai tutupan hutan mencapai 77%. Sebanyak 33% kawasan Hutan Desa yang terdegradasi perlu dilakukan restorasi untuk meningkatkan stok karbon, keanekaragaman hayati, serta manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di kawasan Hutan Desa.



Wisata Rumah Betang, photo oleh Bappeda

### Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Kopi Liberika

Memperbaiki tatakelola gambut melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kubu Raya yang akan menjadi landasan dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pengelolaan gambut. RPPEG diharapkan selesai paling lambat tahun 2023.

### Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Budidaya Paludikultur

Mempercepat penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kubu Raya yang akan menjadi landasan dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pengelolaan gambut. RPPEG diharapkan selesai paling lambat tahun 2023. RPPEG juga akan menjadi landasan bagaimana budidaya paludikultur dikembangkan di lahan gambut secara berkelanjutan.

### Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan: Restorasi Ekosistem

Melakukan rehabilitasi kawasan mangrove sesuai dengan rencana rehabilitasi lahan (tahunan) yang dimiliki perusahaan-perusahaan IUPHHK Restorasi Ekosistem.

### Karet Berkelanjutan

Meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati di areal perkebunan karet rakyat melalui praktek pengelolaan karet berkelanjutan.

<sup>32</sup> Data SRAK-PPH Kubu Raya, 2020.

## STRATEGI 3.

Mendorong legalitas perlindungan di areal berhutan di Kawasan Hutan dan APL (Areal Penggunaan Lain)

### Sawit Berkelanjutan

Pemetaan potensi HCV (*High Conservation Value*) dan HCS (*High Carbon Stock*) di areal perusahaan pemegang IPU seluas 162.175,93 ha, dan areal sawit rakyat swadaya seluas 29.040 ha, dan membangun mekanisme untuk memastikan legalitas kawasan dengan HCV dan HCS tinggi.

Mendorong adanya kebijakan perlindungan di tingkat desa, kabupaten, atau nasional untuk areal berhutan non-izin, termasuk koridor satwa dilindungi, dan kawasan dengan HCV dan HCS.

### Kelapa Dalam

Tidak relevan di area perkebunan kelapa sawit rakyat.

### Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan: Ekowisata

Meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati kunci dan dilindungi, termasuk orangutan dan bekantan, serta legalitas perlindungan di koridor satwa dilindungi dalam kawasan hutan mangrove.

### Hutan Desa untuk Jasa Lingkungan dan Perdagangan Karbon

Hutan Desa di Kubu Raya seluas 121.863 ha sudah mempunyai legalitas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dimana 31 Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) diberikan dalam kurun waktu 2017-2021.



Kawasan Hutan Mangrove, photo oleh Bappeda



Tanaman biji kopi liberika, photo oleh Arief F Rachman

### Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Kopi Liberika

Mendorong adanya kebijakan perlindungan di tingkat desa, kabupaten, atau nasional untuk areal berhutan non-izin, termasuk koridor satwa dilindungi, dan kawasan dengan HCV dan HCS di hutan gambut yang menjadi kebun kopi liberika.

### Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Budidaya Paludikultur

Mendorong adanya kebijakan perlindungan di tingkat desa, kabupaten, atau nasional untuk areal berhutan non-izin, termasuk koridor satwa dilindungi, dan kawasan dengan HCV dan HCS di wilayah budidaya paludikultur.

### Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan: Restorasi Ekosistem

Pemerintah perlu memperkuat komitmen dan strategi pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem dalam perlindungan koridor satwa dilindungi, dan kawasan dengan HCV dan HCS, dan tidak diperlukan legalitas perlindungan tambahan dalam kawasan Restorasi Ekosistem.

### Karet Berkelanjutan

Melakukan pemetaan potensi HCV dan HCS serta koridor satwa dilindungi di wilayah perkebunan karet rakyat.

## STRATEGI 4.

Meningkatkan produktivitas komoditas kunci di Kabupaten Kubu Raya sehingga berkontribusi pada peningkatan PDRB

### Sawit Berkelanjutan

Meningkatkan produktivitas sawit perusahaan dalam produksi TBS menjadi 166.006 ton/tahun di areal seluas 162.175,93 ha, dan produksi sawit rakyat swadaya meningkat menjadi 38.104 ton/ tahun di areal seluas 29.040 ha melalui berbagai pendekatan *Good Agricultural Practices* selambatnya tahun 2028.<sup>33</sup>

Meningkatkan kapasitas 2.370 petani sawit swadaya, penyuluh dan pendamping (dari pemerintah, swasta dan CSO) dalam pengelolaan sawit berkelanjutan, penerapan *Good Agricultural Practices*, dalam rangka peningkatan produktivitas yang akan berkontribusi pada PDRB Kubu Raya.



Hasil panen komoditas sawit, photo oleh Bappeda

### Kelapa Dalam

Revitalisasi tatakelola kelapa sebagai salah satu komoditas penting di Kubu Raya, kepada 10.506 petani. Revitalisasi ini termasuk legalitas, penerapan praktek pertanian yang baik, peremajaan kelapa, penyediaan bibit unggul, peningkatan kapasitas petani kelapa, dan dukungan kebijakan pemerintah. Revitalisasi ini akan meningkatkan produktivitas kelapa dalam sehingga berperan dalam peningkatan PDRB Kubu Raya.



Kelapa bagian dalam, photo oleh Pexel.com

### Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan: Ekowisata

Meningkatkan diversifikasi produk ekowisata mangrove, baik kualitas dan kuantitas ekowisata, maupun pengembangan produk pendukung untuk meningkatkan produktivitas ekowisata, seperti pengembangan ikan mangrove, kepiting mangrove, madu, dan produk olahan dari mangrove.

<sup>33</sup> Data SRAK-PPH Kubu Raya, 2020.



Ikan mangrove, photo oleh WWF - Budi Suriansyah



Kawasan Hutan, photo oleh Kandelia

### Hutan Desa untuk Jasa Lingkungan dan Perdagangan Karbon

Meningkatkan jumlah stok karbon Hutan Desa melalui rehabilitasi dan restorasi kawasan Hutan Desa, yang akan meningkatkan produktivitas dan potensi perdagangan karbon.

Meningkatkan produktivitas jasa lingkungan dari Hutan Desa melalui pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan jasa lingkungan lainnya, yang akan berkontribusi pada pengembangan ekonomi desa dan PDRB Kubu Raya.



Komoditas Kopi Liberika, photo oleh Arief F Rachman

### Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Kopi Liberika

Meningkatkan kapasitas petani kopi liberika untuk menerapkan praktek pertanian yang baik, melalui stretegi budidaya, perlakuan tanaman, pemupukan, pemilihan bibit unggul, dan pengolahan biji kopi sehingga menghasilkan produk kopi liberika berkualitas.



Produk turunan hasil Budidaya Paludikultur, photo oleh Bappeda

### Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Budidaya Paludikultur

Diversifikasi dan intensifikasi budidaya komoditas hortikultura paludikultur untuk meningkatkan produktivitas, termasuk melalui penggunaan bibit unggul, pemuliaan tanaman paludikultur, dan pengolahan komoditas menjadi berbagai produk turunan, dan sebagainya.



Produksi Getah Karet, photo oleh Ekonomi-Bisnis.com

### Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan: Restorasi Ekosistem

Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan restorasi di kawasan Restorasi Ekosistem, yang akan meningkatkan produktivitas kawasan hutan, menambah stok karbon dan jasa lingkungan.

### Karet Berkelanjutan

Peningkatan produktivitas karet rakyat perlu ditingkatkan melalui peremajaan tanaman karet berusia tua, penggunaan bibit karet unggul, serta meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola karet secara berkelanjutan.

## STRATEGI 5.

Menciptakan insentif dan nilai tambah dalam rantai pasok komoditas



Kawasan Perkebunan Sawit, photo oleh Bappeda



Kelapa bagian dalam, photo oleh Depositphotos



Kerupuk Kepiting, photo oleh Bappeda



Madu Kelulut, photo oleh Bappeda

### Sawit Berkelanjutan

Memperkuat tata kelola sawit berkelanjutan kepada 6 perusahaan pemegang UIP sawit yang sudah mempunyai sertifikat ISPO. Sementara 21 perusahaan pemegang UIP sawit lainnya yang belum mempunyai sertifikat ISPO/RSPO untuk didorong proses sertifikasi sawit berkelanjutan sebagai strategi untuk memastikan praktek sawit yang bebas deforestasi, paling lambat tahun 2028.

Memperbaiki tatakelola sawit berkelanjutan kepada 1.000 petani sawit swadaya yang sudah mendapat STDB, dan kepada 1.370 petani swadaya lainnya yang belum mendapat STBD. Selain itu, proses sertifikasi ISPO untuk 2.370 petani sawit swadaya perlu terus dilakukan, selambatnya pada tahun 2028.

### Kelapa Dalam

Perbaiki produktivitas di tingkat 10.506 petani kelapa melalui peremajaan dan pemilihan bibit unggul, dan penerapan praktek pertanian yang baik, serta meningkatkan diversifikasi produk turunan kelapa.

### Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan: Ekowisata

Pengembangan berbagai produk pendukung ekowisata untuk meningkatkan nilai tambah, seperti pengembangan ikan mangrove, kepiting mangrove, madu mangrove, serta produk turunan yang menjadi pendukung ekowisata mangrove.

### Hutan Desa untuk Jasa Lingkungan dan Perdagangan Karbon

Peningkatan diversifikasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk nilai tambah jasa lingkungan dari Hutan Desa, seperti pengembangan madu hutan, ternak, ekowisata Hutan Desa, dan sebagainya.

### Berkelanjutan: Kopi Liberika

Perluasan akses pasar kopi liberika, baik pasar lokal, nasional dan mancanegara, yang akan memberi dampak pada nilai tambah produk kopi liberika.

### Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Budidaya Paludikultur

Perluasan akses pasar produk hortikultura paludikultur di kawasan gambut, dan membuka akses kredit dengan bunga rendah kepada petani paludikultur.

### Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan: Restorasi Ekosistem

Mekanisme insentif kepada pemegang IUPHHK Restorasi Ekosistem bisa dibangun melalui pengurangan kewajiban finansial dan pengurangan pajak.

### Karet Berkelanjutan

Menerapkan skema sertifikasi karet kepada 6.445 petani karet di Kubu Raya, dengan skema SNARPI (*Sustainable Natural Rubber Platform of Indonesia*). Sertifikasi ini diharapkan bisa diterapkan di areal komoditas karet seluas 17.848 hektar di Kubu Raya, dan akan berdampak pada peningkatan nilai tambah komoditas karet rakyat di wilayah ini.



Brand Kopi Juragan, produk Budidaya Paludikultur, photo oleh Bappeda



Pembelian bibit pinang merah oleh masyarakat dan bantuan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kubu Raya, photo oleh JARI Indonesia Borneo Barat



Brand Kopi Gambut, photo oleh Bappeda

## STRATEGI 6.

Memperkuat tata kelola kelembagaan di tingkat yurisdiksi untuk mendukung SRAK PPH Kubu Raya

### Semua Komoditas

Kelembagaan yurisdiksi SRAK-PPH diperkuat melalui pendekatan kolaboratif dan multipihak, dimana semua pihak termasuk pemerintah, sektor swasta (minimal 20 perusahaan), masyarakat sipil, dan petani komoditas (minimal 30 kelompok tani) terlibat dalam struktur kepengurusan SRAK-PPH Kubu Raya.

Memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal implementasi SRAK-PPH Kubu Raya, terutama empat bidang kinerja: (1) data dan publikasi, (2) kemitraan dan kelembagaan, (3) perlindungan hutan dan konservasi, dan (4) pengembangan komoditas berkelanjutan.

# STRATEGI 7.

Meningkatkan akses terhadap pendanaan inovatif di Kabupaten Kubu Raya

## Sawit Berkelanjutan

Memperbaiki tatakelola sawit berkelanjutan kepada 21 perusahaan yang belum mempunyai sertifikasi ISPO/RSPO, sehingga mempermudah mendapatkan akses pendanaan campuran (*blended finance*) dalam rangka memperkuat sustainabiliti pengelolaan komoditas sawit dengan pendekatan yurisdiksi. Potensi pendanaan sawit berkelanjutan di Kubu Raya diperkirakan mencapai US\$ 25.000.000 untuk lima tahun.

## Kelapa Dalam

Memperbaiki business-model dari pengelolaan kelapa dalam oleh 2.730 petani, sehingga mudah mendapatkan akses pendanaan lembaga keuangan (*bankable*) dan lembaga non-keuangan, serta mudah mendapatkan dukungan pendanaan dari investor (*investable*), dan dana filantropi. Potensi investasi kelapa dalam mencapai US\$ 2.500.000 dalam lima tahun.

## Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan: Ekowisata

Meningkatkan *business-model* dari pengelolaan ekowisata sehingga mudah mendapatkan akses pendanaan lembaga keuangan (*bankable*) dan lembaga non-keuangan, serta mudah mendapatkan dukungan pendanaan dari investor (*investable*). Potensi investasi ekowisata mangrove mencapai US\$ 15.000.000 dalam lima tahun.

Meningkatkan potensi jasa ekosistem (ikan, kepiting, madu, dll.) yang menjadi daya tarik/atraksi ekowisata mangrove, sehingga menarik minat investor untuk memberi dukungan pendanaan.

Melakukan promosi perlindungan terhadap 67 spesies mangrove, termasuk 1 spesies langka dan terancam punah, yakni Tumuk Putih atau Berus Mata Buaya (*Bruguiera Hainesii*), sehingga bisa mendapatkan pendanaan inovatif, termasuk filantropi.

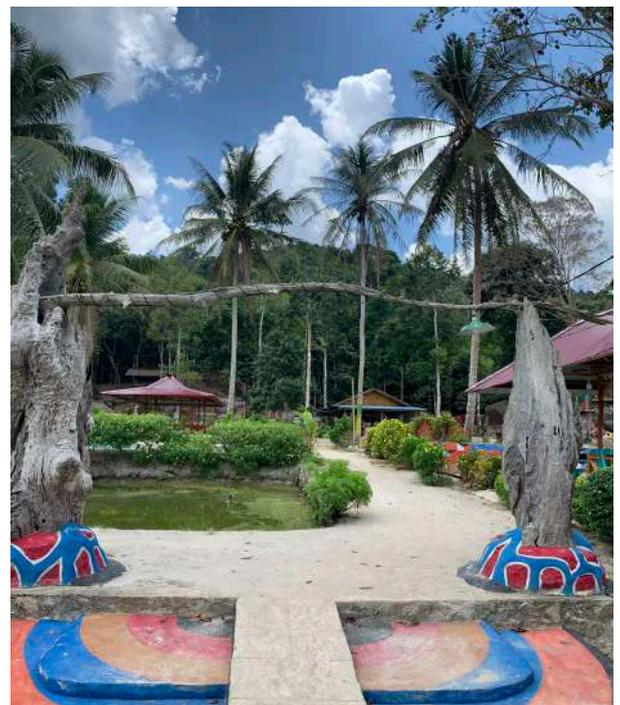
Mempromosikan potensi karbon di kawasan mangrove yang bisa menjadi sumber pendanaan alternatif untuk konservasi mangrove.



Kawasan Perkebunan Sawit, photo oleh Bappeda



Kawasan Budidaya Kelapa, photo oleh Bappeda



Saung Nila Teluk Pekadai, photo oleh Bappeda



Equator Park Kakap, photo oleh Bappeda



Kawasan Hutan, photo oleh Kandelia



Kopi Terantang, photo oleh Bappeda



Peternakan Ayam, photo oleh Bappeda



Komoditas Nanas yang ditanam oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Kalibandung, photo oleh JARI Indonesia Borneo Barat

### Hutan Desa untuk Jasa Lingkungan dan Perdagangan Karbon

Meningkatkan kapasitas pengelola Hak Pengusahaan Hutan Desa (HPHD) dalam mengelola, menjaga dan meningkatkan stok karbon di wilayah HPHD dengan potensi karbon 191.215 tCO<sub>2</sub>e/tahun, sehingga bisa mendapatkan potensi dana perdagangan karbon sebesar Rp 26,77 miliar per tahun.

Meningkatkan kapasitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam membangun business-model dari pengelolaan potensi jasa lingkungan Hutan Desa, sehingga mudah mendapatkan akses pendanaan lembaga keuangan (*bankable*) dan lembaga non-keuangan, serta mudah mendapatkan dukungan pendanaan dari investor (*investable*), dengan potensi pendanaan sebesar Rp. 65.750.509.464 per tahun.

### Berkelanjutan: Kopi Liberika

Memperkuat kapasitas petani kopi liberika dalam membangun business-model yang baik, sehingga mudah mendapatkan akses pendanaan lembaga keuangan (*bankable*) dan lembaga non-keuangan, serta mudah mendapatkan dukungan pendanaan dari investor (*investable*).

### Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Budidaya Paludikultur

Memperkuat kapasitas petani paludikultur dalam membangun business-model yang baik, sehingga mudah mendapatkan akses pendanaan lembaga keuangan (*bankable*) dan lembaga non-keuangan, serta mudah mendapatkan dukungan pendanaan dari investor (*investable*).

### Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan: Restorasi Ekosistem

Memperluas peluang pendanaan campuran (*blended finance*) untuk mendukung pembiayaan restorasi ekosistem, termasuk akses dana publik dan filantropi.

### Karet Berkelanjutan

Memperkuat kapasitas petani karet dalam membangun business-model yang baik, sehingga mudah mendapatkan akses pendanaan lembaga keuangan (*bankable*) dan lembaga non-keuangan, serta mudah mendapatkan dukungan pendanaan dari investor (*investable*).



## KESIMPULAN

Kabupaten Kubu Raya mempunyai komitmen kuat dan siap melaksanakan upaya peningkatan investasi berkelanjutan dengan pendekatan yurisdiksi. Kabupaten Kubu Raya mempunyai dokumen Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Pertumbuhan Hijau (SRAK-PPH) yang menjadi landasan operasional pemerintah kabupaten dan para pihak dalam mendorong percepatan investasi berkelanjutan di daerah ini. Dukungan kebijakan lainnya termasuk Perda No. 6/2013 tentang Penanaman Modal dan RPJMD Kubu Raya 2019-2024 yang ramah investasi hijau dan menjadi landasan legal berjalannya investasi berkelanjutan berbasis yurisdiksi.

Inisiatif-inisiatif dalam investasi berkelanjutan berbasis komoditas dengan pendekatan yurisdiksi tergambar dengan lengkap dalam outlook investasi Kubu Raya 2023 ini. Terdapat sekurangnya delapan komoditas yang berpotensi ditingkatkan skala investasi dengan pendekatan yurisdiksi, baik untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, paludikultur, dan pengelolaan gambut dan mangrove berkelanjutan. Kelapa sawit merupakan komoditas penting Kubu Raya yang berkontribusi sebesar 35,30% terhadap PDRB kabupaten ini. Karena itu, upaya memperkuat keberlanjutan komoditas sawit menjadi sangat penting, bersama dengan komoditas-komoditas utama lainnya.

Pembiayaan campuran (*blended finance*) merupakan pembiayaan terbaik untuk investasi berkelanjutan dengan pendekatan yurisdiksi. Pembiayaan campuran diakui sebagai pembiayaan terbaik untuk mendukung investasi berkelanjutan dengan pendekatan yurisdiksi. Pembiayaan campuran ini diarahkan untuk memobilisasi dana publik dan filantropi untuk mendukung investasi swasta dalam wilayah yurisdiksi. Dana publik dan filantropi biasanya digunakan untuk mempersiapkan kondisi prasyarat (*enabling conditons*), dan juga diinvestasikan dalam pengembangan komoditas berkelanjutan oleh investor dan para pihak.

Inisiatif investasi berkelanjutan berkontribusi terhadap peta jalan Kabupaten Kubu Raya dalam mempercepat pertumbuhan hijau, yang seimbang antara produksi, proteksi/konservasi dan proses multipihak. Peta jalan percepatan pertumbuhan hijau Kabupaten Kubu Raya didukung oleh tujuh strategi, termasuk memperkuat perlindungan dan mencegah deforestasi, melakukan restorasi ekosistem, meningkatkan produktivitas komoditas kunci yang berkontribusi pada PDRB, menumbuhkan insentif dan nilai tambah rantai pasok komoditas, dan akses terhadap pendanaan inovatif (*blended finance*).

# LAMPIRAN

## MATRIKS KOMODITAS UNGGULAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

No	Nama Komoditas	Ringkasan Informasi Komoditas
1	<b>Sawit Berkelanjutan</b>	<p>Inisiatif sawit berkelanjutan utamanya didorong oleh perusahaan-perusahaan sawit dan pabrik kepala sawit yang didukung Pemerintah Kubu Raya dan masyarakat sipil. Para pihak mempunyai komitmen bersama untuk memperkuat sawit berkelanjutan melalui pemantauan, sertifikasi, penelusuran rantai produk, penguatan kapasitas petani swadaya, dan audit untuk memastikan produk sawit bebas deforestasi.</p> <p>Kabupaten ini mempunyai lahan sawit seluas 162.175,93 hektar. Sedangkan lahan sawit rakyat seluas 29.040 hektar. Komoditas ini menyumbang 32,30% (10,09 triliun rupiah) terhadap total PDRB Kubu Raya tahun 2021 sebesar 31,23 triliun rupiah</p>
2	<b>Kelapa Dalam</b>	<p>Pemerintah Kubu Raya didukung oleh masyarakat sipil berkomitmen meningkatkan kapasitas petani Kelapa Dalam untuk memperkuat pengelolaan Kelapa Dalam secara keberlanjutan, dan membangun kemitraan dengan sektor swasta.</p> <p>Luas budidaya di Kubu Raya mencapai 34.284 hektar. Produktivitas kelapa dalam adalah 40.386 ton per tahun, dan mampu memberi lapangan pekerjaan kepada petani pembudidaya sebanyak 10.506 orang.</p>
3	<b>Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan: Ekowisata</b>	<p>Inisiatif ini dikembangkan oleh masyarakat desa, dan secara kolaboratif didukung oleh Pemerintah Kubu Raya, sektor swasta dan masyarakat sipil. Ekowisata merupakan pilihan investasi paling tepat untuk memastikan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.</p> <p>Kabupaten ini mempunyai kawasan hutan mangrove terluas di Kalimantan Barat, yakni 132.887,81 hektar atau 75,84% dari total luas mangrove di Kalimantan Barat.</p> <p>Wisata mangrove saat ini mampu menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat di 6 desa di Kabupaten Kubu Raya.</p>
4	<b>Hutan Desa untuk Jasa Lingkungan dan Perdagangan Karbon</b>	<p>Sebanyak 31 Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) diberikan oleh pemerintah. HPHD kini mengembangkan jasa lingkungan dan perdagangan karbon.</p> <p>Sebanyak 31 HPDH di Kubu Raya telah ditetapkan oleh KLHK dari tahun 2017 sampai 2019 yang tersebar di 6 kecamatan, dengan total luas 121.863 hektar.</p> <p>Potensi pendanaan dengan skema perdagangan karbon mencapai Rp 26.770.123.018 per tahun, dengan asumsi harga karbon US\$10/ton CO<sub>2</sub>/tahun. HPHD Kubu Raya mampu menyerap 191.215 ton CO<sub>2</sub>E/tahun.</p>

No Nama Komoditas	Ringkasan Informasi Komoditas
<p><b>5 Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Kopi Liberika</b></p>	<p>Kopi Liberika mempunyai potensi besar di Kubu Raya. Kopi khas gambut ini sudah mulai diterima oleh pasar lokal, nasional dan sejumlah negara tetangga.</p> <p>Di Kubu Raya, kebun kopi liberika mempunyai mempunyai luas 1.167 hektar, dengan jumlah petani 1.114 orang. Pada tahun 2019, produksi kopi liberika mencapai 1.369 ton, kemudian menurun menjadi 744 ton tahun 2021 karena faktor covid-19.</p>
<p><b>6 Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Budidaya Paludikultur</b></p>	<p>Inisiatif ini berkembang seiring pemanfaatan lahan gambut untuk berbagai komoditas pertanian kering di sejumlah desa, dengan cara mempraktekkan pertanian yang baik (<i>Good Agricultural Practices</i>).</p> <p>Budidaya paludikultur saat ini dikembangkan di KHG Sungai Punggur Besar-Sungai Kapuas seluas 101.269,21 hektar, dengan luas gambut 52.857,56 hektar dan Hutan Lindung seluas 1.117,88 hektar. Berbagai komoditas paludikultur dikembangkan di wilayah ini, termasuk tanaman hortikultura, serai wangi, madu, peternakan, dsb.</p>
<p><b>7 Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan: Restorasi Ekosistem</b></p>	<p>Restorasi Ekosistem menjadi investasi berkelanjutan di sektor kehutanan yang terintegrasi dengan berbagai kegiatan ekonomi lokal, seperti ekowisata, dll.</p> <p>Sebanyak tiga perusahaan restorasi ekosistem (RE) menjalankan peran dan fungsinya di Kubu Raya dalam areal total seluas 42.310 hektar. Meskipun perizinan untuk RE berada di pemerintah pusat (KLHK), namun pelaksanaan program di lapangan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan desa, sehingga RE tepat menjadi bagian skema investasi yurisdiksi.</p>
<p><b>8 Karet Berkelanjutan</b></p>	<p>Inisiatif karet berkelanjutan sangat penting dikembangkan karena karet merupakan komoditas penting setelah sawit. Inisiatif ini masih dipegang oleh petani dan didukung Pemerintah Kubu Raya. Luas lahan budidaya karet di Kubu Raya mendapai 17.848 hektar dan mampu menyediakan lapangan kerja kepada 6.445 petani karet.</p>

# MATRIKS INDIKATOR DAMPAK INVESTASI TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN LINGKUNGAN

No	Nama Komoditas	Indikator Dampak Sosial dan Lingkungan
1	Sawit Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan lapangan kerja kepada 2.370 petani sawit swadaya.</li> <li>Menerapkan <i>Good Agricultural Practices (GAP)</i> di 891,19 hektar lahan sawit swadaya yang sudah mendapatkan STDB.</li> <li>Menjaga kawasan hutan lindung seluas 143.152 hektar.</li> <li>Melindungi 194.264 hektar hutan gambut untuk fungsi lindung (kubah gambut) yang berbatasan dengan IUP kelapa sawit dan perkebunan rakyat dari resiko kebakaran dan kerusakan lahan.</li> <li>Menjaga ketinggian air pada jarak ideal antara permukaan tanah gambut dan tinggi muka air pada kedalaman 25 cm sampai 40 cm.</li> <li>Mengurangi potensi deforestasi.</li> </ul>
2	Kelapa Dalam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan lapangan kerja untuk 10.506 petani.</li> <li>Menjaga ketinggian air pada jarak ideal antara permukaan tanah gambut dan tinggi muka air pada kedalaman 25 cm sampai 40 cm.</li> <li>Mengurangi potensi deforestasi dan intensifikasi budidaya kelapa dalam di lahan masyarakat.</li> </ul>
3	Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan: Ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat di 6 desa yang mengembangkan ekowisata mangrove.</li> <li>Melakukan perlindungan terhadap 67 spesies mangrove, termasuk 1 spesies langka dan terancam punah, yakni Tumuk Putih atau Berus Mata Buaya (<i>Bruguiera Hainesii</i>).</li> <li>Melakukan perlindungan terhadap kawasan hutan mangrove seluas 132.887,81 hektar dari berbagai ancaman kerusakan.</li> </ul>
4	Hutan Desa untuk Jasa Lingkungan dan Perdagangan Karbon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di 31 desa.</li> <li>Melakukan perlindungan dari kerusakan dan kebakaran terhadap 93.929 hektar kawasan HPHD yang masih berhutan, terdiri dari 3,7% hutan lahan kering sekunder, 46,3% hutan mangrove sekunder, dan 50% hutan rawa sekunder.</li> <li>Menjaga ketinggian air pada jarak ideal antara permukaan tanah gambut dan tinggi muka air pada kedalaman 25 cm sampai 40 cm.</li> </ul>
5	Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Kopi Liberika	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan lapangan kerja kepada 1.114 petani kopi liberika.</li> <li>Melakukan perlindungan lahan gambut dari kebakaran dan kerusakan, khususnya di wilayah budidaya kopi liberika seluas 1.167 hektar.</li> <li>Menjaga ketinggian air pada jarak ideal antara permukaan tanah gambut dan tinggi muka air pada kedalaman 25 cm sampai 40 cm.</li> </ul>

No	Nama Komoditas	Ringkasan Informasi Komoditas
6	Pengelolaan Gambut Berkelanjutan: Budidaya Paludikultur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat di 7 desa KPPN Rasau Jaya, 9 desa KPPT Sungai Kakap, KPPT Desa Sumber Agung, dan KPPT Kecamatan Terentang.</li> <li>Melakukan perlindungan lahan gambut dari kebakaran dan kerusakan seluas 52.857,56 hektar.</li> <li>Menjaga ketinggian air pada jarak ideal antara permukaan tanah gambut dan tinggi muka air pada kedalaman 25 cm sampai 40 cm.</li> </ul>
7	Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan: Restorasi Ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan lapangan pekerjaan kepada 100 orang karyawan perusahaan, dan 500 warga desa yang terlibat dalam berbagai kegiatan restorasi, kemitraan, dan CSR perusahaan.</li> <li>Melakukan perlindungan 194,264 hektar lahan gambut untuk fungsi lindung (kubah gambut).</li> <li>Menjaga ketinggian air pada jarak ideal antara permukaan tanah gambut dan tinggi muka air pada kedalaman 25 cm sampai 40 cm.</li> </ul>
8	Karet Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan lapangan kerja kepada 6.445 petani karet.</li> <li>Melakukan perlindungan 194,264 hektar lahan gambut untuk fungsi lindung (kubah gambut) di sekitar lahan kebun karet.</li> <li>Menjaga ketinggian air pada jarak ideal antara permukaan tanah gambut dan tinggi muka air pada kedalaman 25 cm sampai 40 cm.</li> </ul>

## MATRIKS PETA STAKEHOLDER INVESTASI BERKELANJUTAN DI KUBU RAYA

No	Nama Stakeholder	Inisiatif Investasi Berkelanjutan
<b>A Perusahaan Restorasi Ekosistem (RE) di Kubu Raya</b>		
1	PT. Bina Ovivipari Semesta	Mengelola IUPHHK Restorasi Ekosistem seluas 10.100 ha berdasarkan SK.68/MenHut-II/2006, Tgl 27 Maret 2006.
2	PT. Kandelia Alam	Mengelola IUPHHK Restorasi Ekosistem seluas 18.130 ha berdasarkan SK.249/MENHUT-II/2008, Tgl 24 Juni 2008.
3	PT. Ekosistem Khatulistiwa Lestari	Mengelola IUPHHK Restorasi Ekosistem seluas 14.080 ha berdasarkan Sk Menhut 560/Menhut-II/2011, Tgl. 30 September 2011.
<b>B Perusahaan Pemegang IUP Kelapa Sawit di Kubu Raya</b>		
1	PT. Bina Agro Berkembang Lestari	IUP Kelapa Sawit seluas 1.456,74 ha di Kec. Sungai Raya dan Kubu. Sudah mendapat sertifikat ISPO.
2	PT. Cipta Tumbuh Berkembang	IUP Kelapa Sawit seluas 2.654,68 ha di Kec. Teluk Pakedai dan Kubu. Sudah mendapat sertifikat ISPO.

No	Nama Stakeholder	Inisiatif Investasi Berkelanjutan
3	PT. Sintang Raya	IUP Kelapa Sawit seluas 11.070,71 ha di Kec. Kubu. Sudah mendapat sertifikat ISPO.
4	PT. Mitra Aneka Rezeki	IUP Kelapa Sawit seluas 13.892,59 ha di Teluk Pakedai dan Kubu. Sudah mendapat sertifikat ISPO.
5	PT. Cipta Tumbuh Berbuah	IUP Kelapa Sawit seluas 2.553,61 ha di Kec. Sungai Raya. Sudah mendapat sertifikat ISPO.
6	PT. Rezeki Kencana	IUP Kelapa Sawit seluas 7.602,92 ha di Kec. Teluk Pakedai, Kubu dan Terentang. Sudah mendapat sertifikat ISPO.
7	PT. Bumi Pratama Khatulistiwa	IUP Kelapa sawit seluas 4.814, 76 ha di Kec. Kuala Mandor
8	PT. Bumi Alam Sentora	IUP Kelapa Sawit seluas 2.556,51 ha di Kec. Sungai Raya dan Ambawang
9	PT. Asia Palem Lestari	IUP Kelapa Sawit seluas 1.501,83 ha di Kec. Rasau Jaya dan Sungai Raya
10	PT. Bumi Perkasa Gemilang	IUP Kelapa Sawit seluas 11.802,58 ha di Kec. Terentang
11	PT. Agro Alam Nusantara	IUP Kelapa Sawit seluas 716,61 ha di Kec. Rasau Jaya dan Sungai Raya
12	PT. Fajar Saudara Lestari	IUP Kelapa Sawit seluas 10.522,23 ha di Kec. Batu Ampar
13	PT. Gerbang Benua Raya	IUP Kelapa Sawit seluas 19.850,65 ha di Kec. Batu Ampar
14	PT. Graha Agro Nusantara	IUP Kelapa Sawit seluas 16.553,12 ha di Kec. Sungai Ambawang dan Sungai Raya
15	PT. Hampan Kencana Sakti	IUP Kelapa Sawit seluas 1.870,26 ha di Kec. Teluk Pakedai dan Kubu
16	PT. Ichiko Agro Lestari	IUP Kelapa Sawit seluas 7.019,93 ha di Kec. Kubu
17	PT. Kusuma Alam Sari	IUP Kelapa Sawit seluas 9.847,58 ha di Kec. Sungai Ambawang dan Sungai Raya
18	PT. Nusa Jaya Perkasa	IUP Kelapa Sawit seluas 8.366,68 ha di Kec. Sungai Ambawang dan Sungai Raya
19	PT. Palmdale Agri Asia Lestari Makmur	IUP Kelapa Sawit seluas 8.378,88 ha di Kec. Sungai Ambawang
20	PT. Pinang Witmas Abadi	IUP Kelapa Sawit seluas 8.074,76 ha di Kec. Sungai Raya dan Sungai Ambawang
21	PT. Pundi Lahan Khatulistiwa	IUP Kelapa Sawit seluas 1.253,22 ha di Kec. Sungai Raya dan Sungai Ambawang
22	PT. Punggur Alam Lestari	IUP Kelapa Sawit seluas 6.813,05 ha di Kec. Sungai Kakap dan Teluk Pakedai
23	PT. Putra Lirik Domas	IUP Kelapa Sawit seluas 1.359,30 ha di Kec. Rasau Jaya

No	Nama Stakeholder	Inisiatif Investasi Berkelanjutan
24	PT. Rajawali Jaya Perkasa	IUP Kelapa Sawit seluas 4.342,81 ha di Kec. Sungai Raya dan Rasau Raya
25	PT. Sawit Jaya Makmur	IUP Kelapa Sawit seluas 9.088,18 ha di Kec. Sungai Raya
26	PT. Solusi Jaya Perkasa	IUP Kelapa Sawit seluas 1.805,70 ha di Kec. Terentang
27	PT. Sumatera Unggul Makmur	IUP Kelapa Sawit seluas 669,12 ha di Kec. Sungai Kakap dan Rasau Jaya
<b>C Pabrik Kelapa Sawit di Kubu Raya</b>		
1	PT. Bumi Pratama Khatulistiwa	Pabrik kelapa sawit di Kec. Sungai Ambawang
2	PT. Mitra Aneka Rezeki	Pabrik kelapa sawit di Kec. Kubu. <i>Sudah mendapat sertifikat ISPO.</i>
3	PT. Rezeki Kencana	Pabrik kelapa sawit di Kec. Teluk Pakedai. <i>Sudah mendapat sertifikat ISPO.</i>
4	PT. Sintang Raya	Pabrik kelapa sawit di Kec. Kubu. <i>Sudah mendapat sertifikat ISPO.</i>
5	PT. Ichiko Agro Lestari	Pabrik kelapa sawit di Kec. Kubu
6	PT. Graha Agro Nusantara	Pabrik kelapa sawit di Kec. Sungai Ambawang
7	PT. Bumi Perkasa Gemilang	Pabrik kelapa sawit di Kec. Terentang
8	PT. Pundi Lahan Khatulistiwa	Pabrik kelapa sawit di Kec. Sungai Ambawang
9	PT. Cipta Tumbuh Berbuah	Pabrik kelapa sawit di Kec. Sungai Raya
10	PT. Asia Palem Lestari	Pabrik kelapa sawit di Kec. Rasau Jaya
11	Fajar Saudara Lestari	Pabrik kelapa sawit di Kec. Batu Ampar
<b>D Inisiatif Mitra Pembangunan di Kubu Raya</b>		
1	Bentang Kalimantan	Bentang Kalimantan bekerja dalam memperkuat kapasitas petani sawit swadaya dalam pengelolaan sawit berkelanjutan di Kubu Raya. Selain itu, Bentang Kalimantan juga melakukan berbagai program pencegahan kerusakan dan kebakaran gambut di kabupaten ini.
2	Earthqualizer	Earthqualizer membangun kolaborasi dengan sejumlah perusahaan sawit di Kubu Raya dalam rangka meningkatkan kapasitas dan tanggung jawab sosial perusahaan, tanggung jawab pemulihan/restorasi atas pembukaan lahan, serta memastikan <i>no deforestation</i> dan <i>no peat exploitation</i> .
3	GCF Task Force	GCF Task Force bersama sejumlah pihak memperkuat database perkebunan kelapa sawit swadaya (by name by address) yang terintegrasi dengan database Pokja Geoportal Kabupaten Kubu Raya. Database ini akan menjadi pondasi dalam penerbitan STDB dan pengambilan kebijakan dalam perbaikan tatakelola sawit berkelanjutan di Kubu Raya.

No	Nama Stakeholder	Inisiatif Investasi Berkelanjutan
4	IDH-Inisiatif Dagang Hijau	IDH menjadi inisiator dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Percepatan Pertumbuhan Hijau (SRAK-PPH) Kubu Raya. IDH juga memfasilitasi pembentukan Pokja PPH Kubu Raya. Lembaga ini juga mengimplemantasikan pendekatan PPI Compact (Produksi, Proteksi dan Inklusi) kepada sejumlah perusahaan sawit di Kubu Raya.
5	INTAN (Institut Pengembangan Teknologi Hasil Hutan)	Melakukan pengolahan buah tengkawang menjadi berbagai produk, termasuk di Kubu Raya. Secara tradisional, buah tengkawang digunakan sebagai pengganti minyak goreng, rempah makanan, obat-obatan herbal, minyak untuk lampu, lilin, kosmetik, dan untuk ritual adat. INTAN melakukan pengembangan teknologi pengolahan buah tembawang secara modern menjadi margarin, kosmetik, es krim, dan sebagainya. Potensi buah tengkawang di Kubu Raya bisa dikembangkan untuk skala industri.
6	JARI Indonesia Borneo Barat	JARI melakukan sejumlah kegiatan untuk memperkuat praktek keberlanjutan di Kubu Raya, termasuk memperkuat kapasitas Pemerintah Kubu Raya dan sejumlah desa dalam transfer anggaran berbasis ekologi (TAKE). Selain itu, JARI juga melakukan pendampingan masyarakat di Desa Kalibandung, Kecamatan Sungai Raya, dalam meningkatkan produktivitas komoditas jahe dan beras merah, dan diolah menjadi produk yang bisa diterima pasar.
7	Rumah Berkelanjutan	Rumah Berkelanjutan (RB) merupakan lembaga riset yang berpusat di Jakarta. RB berkolaborasi dengan Swandiri Inisiatif Sintan (SIS), Tropical Forest Alliance (TFA) dan Indonesia Budiness Council for Sustainable Development (IBCSD) melakukan proses penyusunan Outlook Investasi Kubu Raya 2023.
8	Sangga Bumi Lestari	Sangga Bumi Lestari (SBL) melakukan engagement dengan perusahaan sawit dan pemerintah, serta NGO lokal dan internasional, dalam memperkuat sawit berkelanjutan di Kubu Raya. SBL melakukan studi rantai pasok dan monitoring konversi hutan alam setiap 6 bulan.
9	SIAR	SIAR membangun kerjasama dengan masyarakat di 3 desa di Kabupaten Kubu Raya. SIAR membangun upaya meningkatkan sustainability rantai pasok sawit swadaya. Selain itu, SIAR juga memperkuat petani kelapa dalam memproduksi gula kelapa secara berkelanjutan.
10	Swandiri Inisiatif Sintang (SIS)	SIS bekerja di Kubu Raya dalam memperkuat sejumlah desa untuk menerapkan praktek sawit berkelanjutan bersama USAID SEGAR. SIS juga berkolaborasi dengan Rumah Berkelanjutan (RB), Tropical Forest Alliance (TFA) dan Indonesia Budiness Council for Sustainable Development (IBCSD) melakukan proses penyusunan Outlook Investasi Kubu Raya 2023.
11	USAID SEGAR	USAID SEGAR membangun kapasitas penyuluh, pendamping dan petani sawit dalam proses registrasi STDB dan sertifikasi ISPO/RSPO kepada 1.000 petani swadaya kelapa sawit. USAID SEGAR juga melakukan studi rantai pasok komodits Kelapa Dalam di Kubu Raya. Saat ini, USAID SEGAR juga sedang memfasilitasi koordinasi Pemkab Kubu Raya dan Pemprov Kalimantan Barat dalam proses penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kubu Raya.
12	World Agroforestry (ICRAF)	ICRAF memfasilitasi penyusunan RPPEG (Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut) di Kabupaten Kubu Raya.
13	WWF Indonesia Kalbar	WWF Indonesia membangun kolaborasi dengan berbagai pihak di Kubu Raya dalam mendorong pengelolaan hutan lestari, penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah, serta mendorong pengelolaan komoditas berkelanjutan. WWF Kalbar melakukan pendampingan petani gula kelapa melalui penggunaan tungku hemat energi untuk mengurangi penggunaan kayu bakar dari kayu mangrove.
14	Yayasan Diantama Pontianak	Yayasan Diantama mendorong penerapan pengelolaan lahan tanpa bakar di dua desa di Kubu Raya. Bekerjasama dengan pemerintah Kubu Raya dan sejumlah pihak, program ini kemudian diaplikasi di banyak lokasi lain di Kalimantan Barat.

No Nama Stakeholder	Inisiatif Investasi Berkelanjutan
15 Yayasan Hutan Biru (YHB)	Yayadan Hutan Biru mempromosikan pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan melalui pendekatan silvikultur dan penguatan sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kubu Raya.
16 Yayasan Natural Kapital Indonesia (YNKI)	YNKI mengimplentasi pendekatan <i>landscape</i> berkelanjutan di Kabupaten Kubu Raya, melalui kegiatan asesment HCV dan HCS di sejumlah <i>landscape</i> gambut untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati. YNKI juga melakukan upaya mitigasi kebakaran gambut.
17 Yayasan Planet Indonesia (YPI)	YPI melakukan upaya pelestarian ekosistem beresiko melalui perbaikan tatakelola yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sosial-ekologis di Kubu Raya. YPI memperkuat pengelolaan Hutan Desa untuk konservasi mangrove di Kubu Raya.
18 Yayasan Titian Lestari	Yayasan Titian Lestari membangun kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional seperti USAID, WWF Indonesia, TAF, dan CLUA, membangun program untuk memperbaiki tatakelola sumberdaya alam berbasis masyarakat. Titian saat ini sedang membangun program peningkatan kapasitas masyarakat dan pengembangan usaha komoditas (wisata mangrove, langsung) yang resiliensi terhadap perubahan iklim di Kubu Raya.
<b>E Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) di Kubu Raya</b>	
1 HPHD Batu Ampar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 33.140 ha</li> <li>• SK. 515/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 26.609 hektar dengan potensi penyerapan karbon 23.374 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Silvofisheri, yang melakukan budidaya (keramba) kepiting bakau, ikan tirus, dan memproduksi kerupuk kepiting.</li> <li>• Membentuk KUPS Madu Kelulut I, yang mengembangkan madu kelulut.</li> </ul>
2 HPHD Dabong	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 2.869 ha</li> <li>• SK.3820/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 2.150 hektar dengan potensi penyerapan karbon 7.707 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Membentuk KUPS Pokdarwis Sadar Wisata pada tahun 2020, yang melakukan pengembangan ekowisata, track mangrove dan wisata pantai bentang pesisir.</li> </ul>
3 HPHD Kalibandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 7.255 ha</li> <li>• SK. 4769/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 4.004 hektar dengan potensi penyerapan karbon 8.422 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Membentuk KUPS Pinang tahun 2019, yang melakukan budidaya komoditas hortikultura seperti nanas, jahe dan pinang.</li> </ul>
4 HPHD Kampung Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 827 ha</li> <li>• SK.10870/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 707 hektar dengan potensi penyerapan karbon 510 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Membentuk KUPS Madu Kelulut Utama tahun 2019, yang melakukan budidaya madu kelulut.</li> </ul>

5	HPHD Kubu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 4.711 ha</li> <li>• SK. 10638/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 3.721 hektar dengan potensi penyerapan karbon 1.587 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Membentuk KUPS Gula Semut Maju Tani pada tahun 2015, yang melakukan produksi gula semut kelapa.</li> </ul>
6	HPHD Medan Mas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 1.845 ha</li> <li>• SK. 522/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 1.512 hektar dengan potensi penyerapan karbon 438 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Membentuk KUPS Silvopasture tahun 2018, yang melakukan budidaya silvopasture melalui pengelolaan ternak dalam kawasan hutan.</li> <li>• Membentuk KUPS Madu Kelulut tahun 2018 yang memproduksi madu kelulut dalam kemasan</li> </ul>
7	HPHD Nipah Panjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 6.940 ha</li> <li>• SK. 524/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 4.910 hektar dengan potensi penyerapan karbon 13.202 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Membentuk KUPS Pemuar Madu Lebah pada tahun 2020, yang melakukan budidaya madu lebah.</li> </ul>
8	HPHD Padang Tikar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 190 ha</li> <li>• SK. 523/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 39 hektar dengan potensi penyerapan karbon 2.307 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Membentuk KUPS Madu Kelulut 76 pada tahun 2019, yang melakukan pengembangan produk madu kelulut dalam kemasan.</li> <li>• Membentuk KUPS Timur Mandiri tahun 2019, yang memproduksi arang tempurung kelapa.</li> </ul>
9	HPHD Seruat Dua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 613 ha</li> <li>• SK.3879/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 568 hektar dengan potensi penyerapan karbon 962 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Membentuk KUPS Silvofishery tahun 2018, yang melakukan pengembangan integrated farming: budidaya kepiting bakau, ikan gabus, penanaman kelapa dan pinang.</li> </ul>
10	HPHD Sungai Asam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 1.604 ha</li> <li>• SK.10847/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 1.111 hektar dengan potensi penyerapan karbon 244 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Membentuk KUPS Jahe Sungai Asam pada tahun 2019, yang melakukan pengembangan komoditas hortikultura seperti jahe, rambutan dan jengkol.</li> </ul>
11	HPHD Sungai Bemban	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 1.299 ha</li> <li>• SK.10887/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 1.183 hektar dengan potensi penyerapan karbon 0 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Membentuk KUPS Madu Kelulut, yang melakukan budidaya madu kelulut dan ekowisata.</li> </ul>

12	HPHD Sungai Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 29.00 ha</li> <li>• SK. 520/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara yang masih berhutan seluas 6.700 hektar dan potensi penyerapan karbon sebesar 998 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Tahun 2018 dibentuk KUPS Agro Vorestri yang mengembangkan kelapa hibrida.</li> </ul>
13	HPHD Sungai Jawi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 3.385 ha</li> <li>• SK.525/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara yang masih berhutan seluas 2.990 hektar dan potensi penyerapan karbon sebesar 2.343 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Tahun 2020 dibentuk KUPS Kopi Gambut yang bertugas mengembangkan komoditas kopi gambut.</li> <li>• Juga dibentuk KUPS KWT Maju Jaya yang mengembangkan komoditas dan produk hortikultura seperti serbuk jahe wangi, kunir asem majakani, temu lawak campur sari, beras kencur, penanaman alpukat dan jambu mete.</li> </ul>
14	HPHD Sungai Nibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 3.058 ha</li> <li>• SK.3883/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara yang masih berhutan seluas 2.091 dan potensi penyerapan karbon sebesar 12.961 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Dibentuk KUPS Ekowisata Pantai Tengkujung tahun 2015 untuk menjual potensi wisata. Fasilitas wisata: wisata pantai, trek mangrove, menara pantau dan homestay.</li> </ul>
15	HPHD Tasik Malaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 2.850 ha</li> <li>• SK. 521/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 1.932 hektar dengan potensi penyerapan karbon 3.170 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Membentuk KUPS Agroforestry Kelapa tahun 2018, yang melakukan budidaya dan pengolahan komoditas kelapa menjadi kopra, kelapa jambol, arang dan (masih direncanakan) memproduksi PCO atau Pure Coconut Oil.</li> </ul>
16	HPHD Teluk Nibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 2.900 ha</li> <li>• SK. 516/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 684 hektar dengan potensi penyerapan karbon 11.265 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> <li>• Membentuk KUPS Jaya Lestari pada tahun 2019, yang melakukan budidaya madu kelut.</li> <li>• Membentuk KUPS Kopi Gambut yang melakukan budidaya kopi gambut.</li> </ul>
17	HPHD Tanjung Harapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 17.445 ha</li> <li>• SK. 518/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 10.506 hektar dengan potensi penyerapan karbon 64.507 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> </ul>
18	HPHD Ambarawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 4.775 ha</li> <li>• SK. 519/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 3.118 hektar dengan potensi penyerapan karbon 4.478 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> </ul>
19	HPHD Selat Remis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 254 ha</li> <li>• SK.10890/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 71 hektar dengan potensi penyerapan karbon 0 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> </ul>

No	Nama Stakeholder	Inisiatif Investasi Berkelanjutan
20	HPHD Teluk Pakedai Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 295 ha</li> <li>• SK.10881/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 236 hektar dengan potensi penyerapan karbon 717 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> </ul>
21	HPHD Teluk Pakedai Satu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 785 ha</li> <li>• SK.10877/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 766 hektar dengan potensi penyerapan karbon 4 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> </ul>
22	HPHD Permata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 1.908 ha</li> <li>• SK.10871/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 1.905 hektar dengan potensi penyerapan karbon 0 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> </ul>
23	HPHD Teluk Bakung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 5.565 ha</li> <li>• SK.10374/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 3.498 hektar dengan potensi penyerapan karbon 11.228 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> </ul>
24	HPHD Mengkalang Jambu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 2.920 ha</li> <li>• SK.10875/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 1.854 hektar dengan potensi penyerapan karbon 18.649 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> </ul>
25	HPHD Tanjung Beringin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 10.503 ha</li> <li>• SK.10373/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 10.251 hektar dengan potensi penyerapan karbon 2.144 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> </ul>
26	HPHD Betuah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 814 ha</li> <li>• SK.10889/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019</li> <li>• Mempunyai kawasan hutan negara dengan tutupan hutan seluas 8.14 hektar dengan potensi penyerapan karbon 0 ton CO<sub>2</sub>e per tahun.</li> </ul>
27	HPHD Ambawang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 3.283 ha</li> <li>• SK.10889/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019</li> </ul>
28	HPHD Kubu Padi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 1.381 ha</li> <li>• SK. 10296/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019</li> </ul>
29	HPHD Pulau Limbung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 1.332 ha</li> <li>• SK.850/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2020</li> </ul>
30	HPHD Mengkalang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 1.984 ha</li> <li>• SK.5325/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2020</li> </ul>
31	HPHD Muara Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas HPHD 2.726 ha</li> <li>• SK.1537/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021</li> </ul>

No	Nama Stakeholder	Inisiatif Investasi Berkelanjutan
F	<b>Industri Karet Remah (<i>Crumb Rubber</i>) di Kubu Raya</b>	
1	PT. Bintang Borneo Persada	Perusahaan skala besar yang beralamat di Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Kapasitas produksi sekitar 30.000 ton per tahun.
2	PT. GMG Sentosa (Harapan Sentosa)	Perusahaan skala besar yang beralamat di Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Kapasitas produksi perusahaan ini sekitar 25.000 ton per tahun.
3	PT. New Kalbar Processor	Perusahaan skala besar yang beralamat di Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Kapasitas produksi perusahaan ini adalah 30.818 ton per tahun.
4	PT. Giat Usaha Dieng	Perusahaan skala besar yang beralamat di Desa Jawa Tengah (Jalan Trans Kalimantan km 16,8), Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
5	PT. Star Rubber	Perusahaan skala besar yang beralamat di Desa Jawa Tengah (Jalan Trans Kalimantan km 16), Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.